



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN KEUANGAN

**DALAM RANGKA VERIFIKASI PENGHARGAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA TH 2020
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



OLEH TIM PENGGERAK IMPLEMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN

31 MARET 2021





OUTLINE

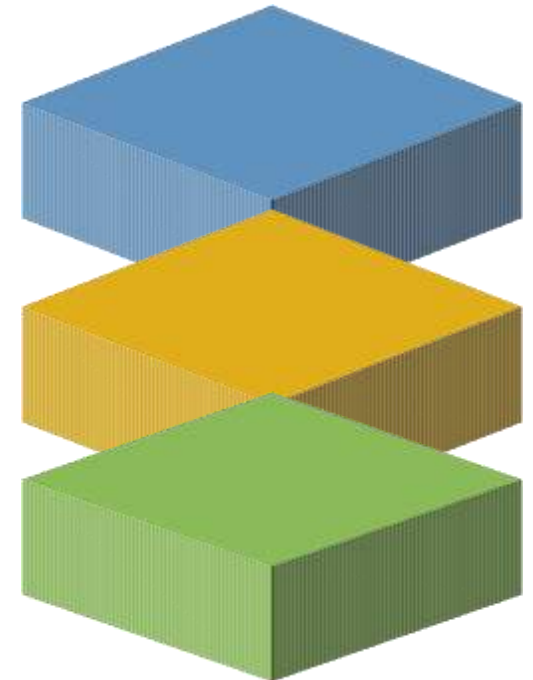
A. DASAR HUKUM PUG KEMENKEU

B. IMPLEMENTASI PUG KEMENKEU

1. Komitmen Pimpinan
KMK 807/KMK.01/2018, Advokasi PUG, Renstra & Roadmap PUG
2. Perkembangan PUG
3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PUG
Eksternalisasi PUG, Internalisasi PUG, Media KIE
4. Inovasi PUG
Sistem Informasi PUG, e-Learning PPRG, Lomba PUG, Pengawasan PPRG -PUG, Media Sosial, Kegiatan Responsif Difabel
5. Gender Responsive Campaign
Webinar SE-36, FWS, Kemenkeu Mengajar, Woman Leadership, UMKM Bangkit

C. KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER KEMENKEU

1. Kebijakan Responsif Gender
Kebijakan Eksternal dan Internal Responsif Gender
2. Program PEN dan Pemberdayaan Perempuan



A portrait of Sri Mulyani Indrawati, Minister of Finance of Indonesia, standing with her arms crossed, wearing a black patterned blazer over a black top, glasses, and a watch. The background is a blurred image of a modern building.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN EKONOMI NASIONAL

- ❖ Pemberdayaan perempuan menjadi penting karena lebih dari sekedar baik secara moral, tapi juga baik dari sisi kebijakan makro fiskal.
- ❖ Ekonomi global berpotensi kehilangan USD 12 Triliun pada tahun 2025 jika tidak menyelesaikan isu ketimpangan gender, sementara Kawasan Asia Pasifik berpotensi kehilangan USD 4,5 Triliun.
- ❖ Mengatasi isu ketimpangan gender akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

53,76% UMKM di Indonesia dimiliki oleh perempuan
di mana 97% karyawannya adalah perempuan.

Kontribusinya terhadap PDB mencapai 61%, investasi 60%, dan ekspor 14,4%. Inilah kekuatan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perjalanan ekonomi Indonesia pun pernah mencatat bahwa bisnis-bisnis yang dikelola perempuan inilah yang mendorong ekonomi kembali bangkit dari krisis 1998.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
The UN Women Asia Pacific Women Empowerment Principles (WEP's)
Awards Ceremony in Indonesia
18 November 2020



DASAR HUKUM PUG KEMENKEU

A



A. DASAR HUKUM PUG KEMENKEU

01

INPRES No. 9 Tahun 2000

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

02

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

03

Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.02/2019

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA/KL dan Pengesahan DIPA

04

Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK. 01/2020

Rencana Strategis Kemenkeu Tahun 2020-2024

05

Keputusan Menteri Keuangan No. 807/KMK. 01/2018

Pedoman Implementasi PUG di Lingkungan Kemenkeu

06

Peraturan Dirjen Anggaran No. 5/AG/2020

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA/KL dan Pengesahan DIPA

IMPLEMENTASI PUG KEMENKEU

B

1. KOMITMEN PIMPINAN
2. PERKEMBANGAN PUG
3. KIE PUG
4. INOVASI PUG
5. GENDER RESPONSIVE CAMPAIGN



B.1. KOMITMEN PIMPINAN

KMK 807/KMK.01/2018 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI PUG DI LINGKUNGAN KEMENKEU

Indikator Pemantauan dan Evaluasi:

1. Terpenuhinya 7 Prasyarat PUG
2. Terbukanya Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat
3. Tidak ada diskriminasi
4. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang responsif gender

1. Pemantauan dilakukan secara kontinu
2. Pemantauan terhadap kegiatan dalam RENJA / RKA K-L
3. Hasil pemantauan digunakan sebagai masukan proses Perencanaan berikutnya

1. Pembinaan secara berjenjang dari Pimpinan Kemenkeu
2. Pelembagaan PUG dengan membentuk Pokja/Tim
3. Pokja/Tim melakukan fungsi driver dan konsultasi bagi unit masing-masing
4. Melaksanakan tugas Pokja/Tim

Anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

PPRG merupakan upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender kedalam proses Perencanaan dan Penganggaran dengan cara penelaahan dampak dari suatu belanja kegiatan serta efeknya terhadap keadilan dan kesetaraan gender.

DASAR HUKUM

1

1. UU 39/1999 (HAM)
2. UU 23/2002 (Perlindungan Anak)
3. UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)
4. INPRES 9/2000 (PUG dalam Pembangunan Nasional)
5. PP 90/2010 (Penyusunan RKA K/L)

TUJUAN

2

1. Memastikan Kebijakan Kemenkeu telah adil dan setara bagi pegawai Kemenkeu
2. Memastikan keberlanjutan PUG di Kemenkeu
3. Memastikan seluruh pegawai Kemenkeu paham PUG

SASARAN

3

Terintegrasinya perspektif gender dalam tugas, fungsi, dan internal budaya Kemenkeu

PENGERTIAN

4

1. Gender adalah peran dan status laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman
2. PUG merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan.

TUJUH PRASYARAT PUG

5

1. Komitmen Politik dan Kepemimpinan Lembaga
2. Kebijakan yang responsif gender
3. Kelembagaan (Pokja / Tim)
4. Sumber Daya (Manusia dan Anggaran)
5. Data Terpilah menurut jenis kelamin
6. Alat Analisis (*Gender Analysis Pathways / GAP*)
7. Partisipasi Masyarakat

EMPAT ASPEK DISKRIMINASI

6

1. Akses
2. Partisipasi
3. Kontrol
4. Manfaat

PEMANTAUAN, EVALUASI,
DAN PELAPORAN

10

PELAKSANAAN KEGIATAN
RESPONSIF GENDER

9

ANGGARAN RESPONSIF
GENDER

8

PERENCANAAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER

7





B.1. KOMITMEN PIMPINAN

ADVOKASI PUG KEMENKEU TAHUN 2019



ARAHAN MENTERI KEUANGAN TERKAIT IMPLEMENTASI PUG

Masyarakat masih memprioritaskan laki-laki dari pada perempuan. Hal ini jangan sampai menyebabkan perempuan mendapatkan akses yang berbeda dari laki-laki.

Perempuan harus membuktikan lebih banyak (*twice as good*) untuk bisa meyakinkan bahwa dia pantas menduduki posisi yang sama dengan laki-laki

Rekrutmen Kemenkeu sudah seimbang tetapi belum berhasil dalam menjaga keseimbangan *in take* dan *out take*, maka perlu diciptakan lingkungan yang netral dan *supportive* terhadap keberlangsungan karier perempuan

Agar pada tahun 2020-2024, **program dibuat secara spesifik berdasarkan evidence based**. Seluruh UEI mulai mengumpulkan *evidence* dan membiasakan identifikasi perbedaan gender agar semakin sensitif gender





B.1. KOMITMEN PIMPINAN

PRIORITAS ISU KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Rakornas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
24 April 2019



Toronto Centre Webinar : Post Covid Crisis
Implications for Financial Stability, Financial
Inclusion, Gender Equality - 29 Juni 2020



Rebirthing The Global Economy
To Deliver Sustainable Development
1 Juli 2020



ADB-UN Women's Virtual High-Level
Roundtable: Promoting Gender Equality in
Covid Response 10 September 2020



The Monash Herb Feith Indonesia- Women in
Leadership in Indonesia : Isu Kesetaraan
Gender dalam Angkatan Kerja 18 Nov 2019



The UN Women Asia Pacific Women
Empowerment Principles Awards Ceremony
in Indonesia – 18 November 2020



Webinar Menuju Planet 50:50. Kontribusi
Bisnis pada Pencapaian SDG's. Kesetaraan
gender pada APBN – 16 Desember 2020



Webinar Perempuan Berdaya
Indonesia Maju: "Refleksi Awal Tahun, Quo
Vadis Perempuan Indonesia" 5 Januari 2021





B.1. KOMITMEN PIMPINAN

PRIORITAS ISU KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Dialog Bersama Menteri Dalam Rangka Percepatan PUG
Bersama Menteri PPPA.
Wakil Menteri Keuangan - 19 Februari 2019



Summit on Girls : Getting Equal - Lets Invest in Girl.
Wakil Menteri Keuangan
10 Desember 2019



Dialog Indonesia-Australia untuk Mempromosikan
Kepemimpinan Perempuan di Sektor Publik.
Inspektur Jenderal Kemenkeu - 28 November 2019





B.1. KOMITMEN PIMPINAN

RENCANA STRATEGIS KEMENKEU TAHUN 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN

1. Penguatan pemahaman dan komitmen stakeholder baik internal maupun eksternal.
1. Peningkatan kebijakan Kementerian Keuangan yang responsif gender.
1. Peningkatan inovasi layanan yang responsif gender.

STRATEGI

1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen diantaranya melalui: (i) kegiatan advokasi PUG, (ii) pembelajaran (*e-learning* dan media pembelajaran lainnya) serta; (iii) kegiatan peningkatan kapasitas pegawai lainnya
1. Peningkatan kualitas kebijakan Kementerian Keuangan yang responsif gender melalui analisis gender dan pengolahan data terpilah yang memadai yaitu : (i) pemutakhiran data terpilah dan; (ii) penyediaan sistem informasi yang mutakhir. Dalam rangka meningkatkan monev, peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) perlu ditingkatkan
3. Pengembangan inovasi dalam berbagai kebijakan, pelayanan serta pengadaan sarana dan prasarana yang responsif gender.



B.1. KOMITMEN PIMPINAN

ROAD MAP PENGUATAN IMPLEMENTASI PUG KEMENKEU

2019

- Internalisasi PUG (Advokasi Pejabat eselon I dan II serta Sosialisasi PUG)
- Peningkatan kualitas PPRG (FGD PPRG APIP Kemenkeu, Buku Pengawasan PPRG dan Implementasi PUG)
- Media KIE PUG (Lomba PUG, Revisi Buku Panduan PUG Kemenkeu, Video PUG)
- **Kebijakan Kemenkeu Responsif Gender**

2020

- Internalisasi dan Eksternalisasi PUG (Edukasi PPRG & PUG Campaign)
- Digitalisasi Data Implementasi PUG (Pengembangan SIPEGIKU Tahap I)
- Peningkatan Kualitas PPRG (Integrasi PUG dalam Pengawasan Internal)
- Inovasi Media KIE PUG dengan konsep *New Normal* (*e-Learning* PPRG, Buku *Best Practices* PUG, Media Sosial, Webinar)
- **Optimalisasi Kebijakan Responsif Gender Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

2021

- Internalisasi dan Eksternalisasi PUG (Edukasi PPRG & PUG Campaign)
- Pembangunan Database Implementasi PUG (12 Satker Pusat dan 845 Vertikal)
- Peningkatan Kualitas PPRG (*Quality Assurance* ARG oleh APIP Kemenkeu)
- Inovasi Media KIE PUG dengan konsep *New Normal* (Lomba PUG, *e-learning* PPRG, medsos, dll)
- **Optimalisasi Kebijakan Responsif Gender Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

2022

- Internalisasi dan Eksternalisasi PUG (Edukasi PPRG & PUG Campaign)
- Pengembangan SIPEGIKU Tahap II
- Peningkatan Kualitas PPRG (*Quality Assurance* ARG oleh APIP Kemenkeu)
- Inovasi Media KIE PUG dengan konsep *New Thinking of Working* (NTOW)/FWS (Lomba PUG, *e-learning* PPRG, medsos, dll)
- **Optimalisasi Kebijakan Responsif Gender Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

2023

- Internalisasi dan Eksternalisasi PUG (Edukasi PPRG & PUG Campaign, Komunitas Sadar PUG di sektor publik)
- Peningkatan Kualitas PPRG (Pemutakhiran Data Terpilah)
- Inovasi Media KIE PUG dengan konsep NTOW/FWS
- Optimalisasi Kebijakan Responsif Gender dalam kerangka GR PFM (*Gender Responsive Public Financial Management*)

Inovasi Kebijakan, Layanan dan Sarpras Kemenkeu Responsif Gender
(GENDER RESPONSIVE PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT)



B.2. PERKEMBANGAN PUG

Perjalanan Awal

2000-2009

- ❑ Penugasan Tim PUG oleh Menkeu melalui ST MK No. 134/2004
- ❑ Pelembagaan Tim PUG 2006
- ❑ Internalisasi PUG dimulai sejak 2005 melalui Advokasi Pejabat, *Capacity Building*, seminar, workshop Tim PUG
- ❑ Penyusunan kebijakan awal ARG
- ❑ *Pilot project* ARG bagi 7 K/L
- ❑ Implementasi ARG (PMK 119/PMK.02/2009 Juksunlah RKA-K/L)
- ❑ Prestasi PUG (APE Pratama 2009)

Perkembangan Pesat

2010-2013

- ❑ Pelembagaan Tim PUG Kemenkeu
- ❑ Buku Panduan PUG - PPRG Kemenkeu
- ❑ Sosialisasi, Bimtek, *Capacity Building* PUG dan PPRG
- ❑ *E-Learning* PUG
- ❑ Advokasi PUG
- ❑ *Daycare Seasonal* Kemenkeu
- ❑ KIE PUG melalui media cetak dan elektronik
- ❑ Prestasi PUG (APE Madya Th. 2010-2011 dan APE Utama Th. 2012)

Tahap Mentor

2014-2020

- ❑ Advokasi PUG bersama Menkeu
- ❑ Pelembagaan Tim PUG Kemenkeu
- ❑ Penguatan Dasar Hukum PUG Kemenkeu KMK 807/KMK.01/2018
- ❑ Sosialisasi PUG dan *e-Learning* PPRG
- ❑ Buku Panduan PUG Kemenkeu
- ❑ Buku Pedoman Pengawasan PPRG
- ❑ *Daycare Seasonal* Kemenkeu
- ❑ *Quality Assurance* ARG oleh APIP
- ❑ Inovasi Lomba PUG Kemenkeu
- ❑ Aplikasi SIPEGIKU tahun 2020
- ❑ Prestasi PUG (APE Mentor Th. 2014, 2016, dan 2018)



B.3. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi PUG

INTERNALISASI PUG

SEBELUM NEW NORMAL

DATA TERPILAH SDM PESERTA SOSIALISASI PUG KEMENKEU DI DAERAH

TAHUN	JUMLAH LOKASI	SOSIALISASI TATAP MUKA	
		JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
2010	9	203	143
2011	12	240	219
2012	7	127	130
2013	5	69	106
2014	4	58	83
2015	6	93	91
2016	8	102	115
2017	5	106	79
2018	6	87	68
2019	12	50	46
Jumlah	72	1.135	1.080

TOTAL PESERTA

2.215

EFISIENSI
DALAM
PELAKSANAAN
EDUKASI PUG

NEW NORMAL

DATA TERPILAH SDM PESERTA E-LEARNING PPRG KEMENKEU TAHUN 2020

UNIT ESELON I	JENIS KELAMIN	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
SETJEN	28	10
DJA	3	8
DJ	482	169
DJBC	393	100
DJPB	420	161
DJKN	86	31
DJPK	2	0
DJPPR	2	0
ITJEN	5	7
BKF	3	0
BPPK	45	20
LNSW	0	0
JUMLAH	1.467	506
TOTAL PESERTA	1.973	

- ❑ E-learning PPRG tahun 2020 diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Pelayanan dan Pejabat Pengelola Keuangan (level eselon III)
- ❑ E-learning PPRG 2021 rencananya akan diikuti oleh seluruh user aplikasi SIPEGIKU pada 842 satker (1700 pegawai)

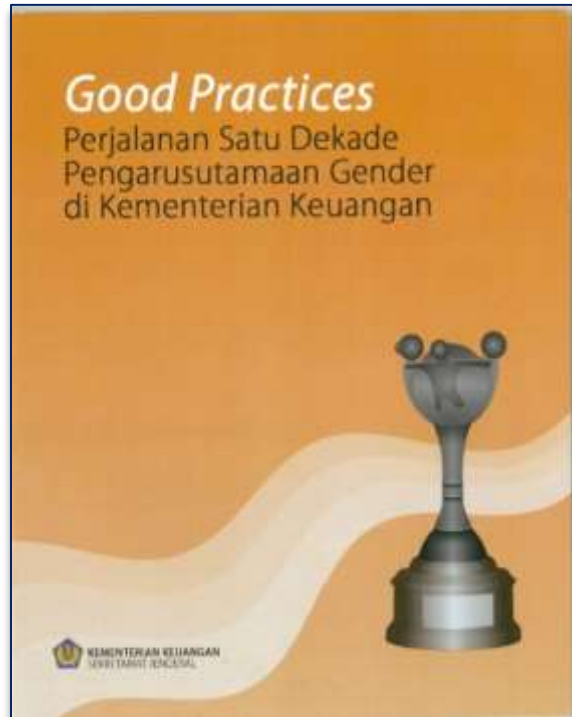
* Peserta Bersertifikat



B.3. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi PUG

MEDIA KIE

1



Refleksi perjalanan PUG selama 10 tahun. Menggambarkan perjalanan awal, penguatan kelembagaan, dan tahap maju termasuk capaian tantangan PUG Kemenkeu.

2



Lesson learned yang berisi kompilasi praktik-praktik baik dalam implementasi PUG dari satuan kerja pemenang Lomba Implementasi PUG Kemenkeu tahun 2015-2019.

3



Implementasi PUG bersifat dinamis, sehingga perlu penyesuaian sesuai perkembangan terkini. Merupakan revisi dari Buku Panduan PUG Kemenkeu tahun 2010.



B.3. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi PUG

MEDIA KIE

WEBSITE KEMENKEU



WEBSITE UNIT ESELON I



KANAL BC RADIO



Inspirasi Pagi bertema PUG di kanalbc.beacukai.go.id untuk internal dan eksternal Kemenkeu Bersama Gender Champion Kemenkeu



LED/STANDING BANNER



BROSUR/BUKU SAKU





B.4. INOVASI PUG

SISTEM INFORMASI PUG INTERNAL KEMENKEU (SIPEGIKU)

SIPEGIKU merupakan perwujudan amanat KMK 807/KMK.01/2018 agar Kemenkeu melaksanakan kegiatan pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangan Kemenkeu.

SIPEGIKU Ditujukan untuk mewujudkan komitmen pimpinan satker dalam mengimplementasikan 7 Prasyarat PUG Kemenkeu.



B.4. INOVASI PUG

E-LEARNING PPRG

Materi e-Learning PPRG dilaksanakan sebanyak 12 jam pelatihan dalam 5 hari pelatihan, meliputi:

1. Pengarusutamaan Gender (PUG)
2. Tujuh Prasyarat PUG
3. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
4. *Best Practices* PUG

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN E-LEARNING PPRG KEMENKEU

Angkatan	Tanggal	Hasil Evaluasi		Penilaian Umum	Peserta Pengisi Kuesioner
		Rata-rata Kepentingan	Persepsi/Kenyataan		
I	11 s.d. 15 Mei 2020	4,70	4,37	Sangat Baik	273
II	8 s.d. 12 Juni 2020	4,74	4,61	Sangat Baik	268
III	15 s.d. 19 Juni 2020	4,69	4,62	Sangat Baik	526
IV	22 s.d. 26 Juni 2020	4,74	4,69	Sangat Baik	501
V	29 Juni s.d. 3 Juli 2020	4,71	4,64	Sangat Baik	397

Materi evaluasi meliputi

1. Kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta
2. Bahan ajar mudah dipahami
3. Kesesuaian metode pembelajaran dengan metode e-learning
4. Kesiapan penyelenggara melayani peserta
5. Menu fasilitas e-learning
6. Fasilitas e-learning

KEMENKEU
LEARNING
CENTER

Carilah pelatihan dan pengetahuan...

Pelatihan Pusat Pengetahuan Pusat Bantuan

Beranda -> Pelatihan -> E-Learning PPRG

E-Learning PPRG
diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan

Setelah mengikuti E-Learning Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) peserta diharapkan dapat menjelaskan perencanaan dan penganggaran responsif gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1989 Peserta terdaftar

4.90
★★★★★
1234 Ulasan

MULAI



B.4. INOVASI PUG

LOMBA IMPLEMENTASI PUG KEMENKEU TAHUN 2019

DEWAN JURI

- Berdasar KMK No. 213/KM.1/2019
- Penugasan Dewan Juri :
 - Kepala Bagian Perencanaan
 - Yulfita Raharjo, Pakar Gender
 - Yurni Satria, Pakar Gender

PESERTA

- KPP Pratama Surakarta wakil DJP
- Kanwil DJPB Gorontalo wakil DJPB
- KPPBC TMP A Bekasi wakil DJBC
- BDK Malang wakil BPPK
- KPKNL Medan wakil DJKN

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMENANG



Juara I
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surakarta



Juara II
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.
Gorontalo



Juara III
Kantor Pelayanan dan
Pengawasan Bea dan Cukai TMP
A Bekasi

INOVASI PEMENANG LOMBA



Form Dispenser



Literasi PUG Perbendaharaan



Seminar Nasional Pencegahan
Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

KPP Pratama
Surakarta



Pojok Pajak Pasar

Kanwil DJPB Prov.
Gorontalo



Aplikasi PUG

KPPBC Bekasi



Pelatihan Bahasa Isyarat untuk
layanan inklusi



B.4. INOVASI PUG

PENGAWASAN PPRG DAN IMPLEMENTASI PUG OLEH APIP KEMENKEU

KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

1

Forum Group Discussion “Implementasi PUG di Kemenkeu dan Peran Auditor dalam Pengawasan PUG” tanggal 20 Juli 2018

2

Kegiatan Seminar “Peran APIP dalam reviu ARG dan Monev Implementasi PUG” dengan mengundang APIP K/L lain pada tanggal 23 Januari 2020 di Gedung Dhanapala Kemenkeu.

3

Kegiatan pengawasan PPRG dan PUG diparalelkan bersama pengawasan rutin dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Itjen sesuai ND-466/IJ.7/2020 tanggal 3 November 2020

4

Rapat Koordinasi “Peran Pengawasan Itjen dalam Implementasi PUG dan Penilaian GBS di Lingkungan Kemenkeu” tanggal 3 Februari 2021

5

Workshop “Peran Reviu Auditor Itjen dalam Meningkatkan Kualitas GBS- ARG” Bersama Tim PUG Kemenkeu dan KPPPA tanggal 5 Maret 2021

PERAN APIP

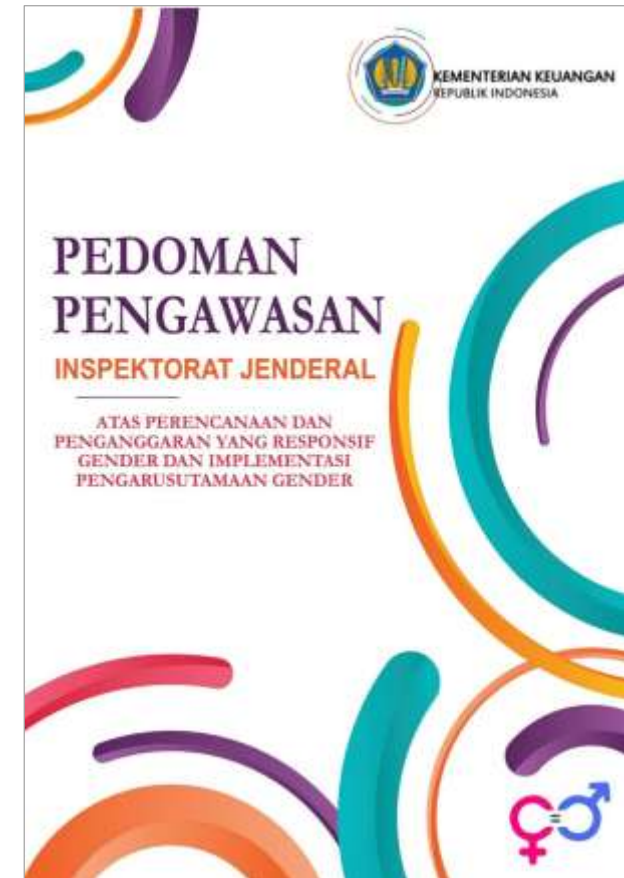
1

Meningkatkan kualitas PPRG melalui Buku Pedoman Pengawasan ITJEN atas PPRG dan Implementasi PUG

2

Meningkatkan kualitas ARG melalui *Gender Budget Statement* (GBS)

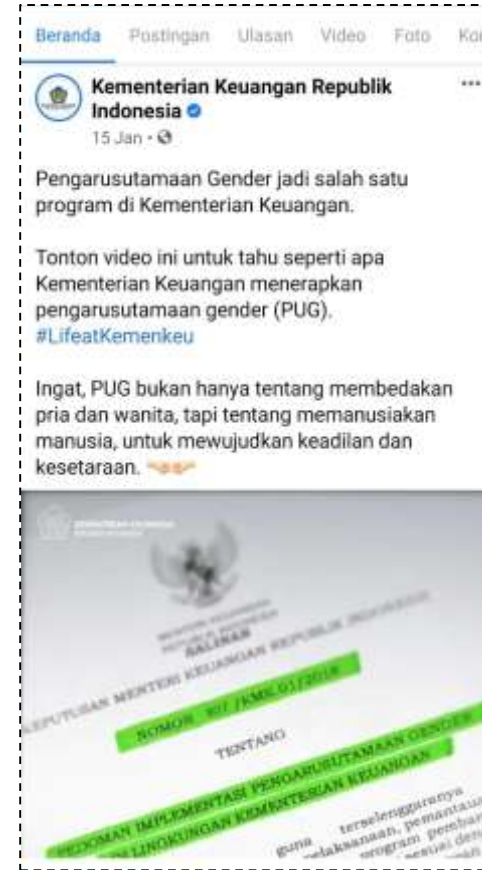
PANDUAN APIP





B.4. INOVASI PUG

OPTIMALISASI MEDIA SOSIAL KEMENKEU (INSTAGRAM, FACEBOOK, DAN TWITTER)





B.4. INOVASI PUG

SARPRAS RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN IBU, ANAK, DAN ORANG DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS

DAYCARE SEASONAL KEMENTERIAN KEUANGAN
BEKERJASAMA DENGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2019



PENGHARGAAN RUANG LAKTASI TERBAIK
KATEGORI INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019



PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK RAMAH
KELOMPOK RENTAN BERKEBUTUHAN KHUSUS
TAHUN 2020



B.4. INOVASI PUG

KEBIJAKAN DAN KEGIATAN RESPONSIF TERHADAP KELOMPOK DIFABEL

PPID KEMENKEU RAMAH DISABILITAS



Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam bentuk *mobile* PPID dan *website* PPID yang memberikan kesetaraan akses atas informasi bagi komunitas tuli membuktikan komitmen Kemenkeu dalam Keterbukaan Informasi Publik bagi semua kalangan.

WEBINAR PENTINGNYA BAHASA ISYARAT



Surya Sahetapy mewakili komunitas tuli yang berprestasi memberi pemahaman tentang pentingnya bahasa isyarat dalam bermasyarakat dan pembangunan. Kegiatan Webinar “Sign Language” dalam rangka meningkatkan layanan publik bagi semua kalangan.

KELAS BAHASA ISYARAT



Pelatihan Kelas Bahasa isyarat untuk membangun lingkungan kerja yang inklusif dan mewujudkan layanan kerja yang prima bagi semua kalangan.



B.5. GENDER RESPONSIVE CAMPAIGN

WEBINAR PENCEGAHAN DAN DUKUNGAN PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KERJA KEMENKEU

event

**WEBINAR: MENJAGA PRODUKTIVITAS MELALUI
LINGKUNGAN KERJA AMAN, NYAMAN, DAN BERMARTABAT**

Keynote Speech

Ronald Sitaban
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Hadiyanto
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

Narasumber

Nirmala Ika Kusumaningrum
Partner Associate
Kognisi Putih

Antik Bintari
Gender Specialist
Universitas Padjadjaran

Rukijo
Kepala Biro SDM
Satjen Kementerian

Chalimah Pujihastuti
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Satjen Kementerian

Rabu, 23 Desember 2020
08.30 s.d. 11.45 WIB

zoom YouTube

Registrasi:
bit.ly/WebinarJagaProduktivitas

Internalisasi PUG melalui penyelenggaraan Webinar Sosialisasi SE-36/MK.01/2020 bertema Menjaga Produktivitas Melalui Lingkungan Kerja Aman, Nyaman, dan Bermartabat -- 23 Desember 2020

THE WORLD CUSTOM ORGANIZATION WORKING GROUP ON GENDER EQUALITY, DIVERSITY AND INTEGRITY

GoToMeeting

People can see your screen.

Talking: Johanna Törnström

View Everyone

Mathilde Liogier

Johanna Törnström

IB

Inti Briliani

Lazzat

Sigfrður Gunnar

Catherine

Naama Ben M...

Yuri

DOLAN, DAVID

Carlos Enriquez

Arif

Evelyn Figueira

Salifu Koray

An Tiasary

GCI-Sekretaria...

Administrator

BRIGITTE MUY...

IBTC

Pamchanok Pra...

Imen Bahdous

Women perceive corruption differently than men

TRUE

WCO

Women are less involved in bribery and less likely to condone bribe taking. When engaging in corruption, women are also significantly less aggressive in the amount they extract than their male counterparts. Women appear to be more vulnerable to punishment and the risks involved in corruption due to explicit or tacit gender discrimination.

- Impact of corruption on a woman's professional reputation can be different of on a man's.
- Women are sometimes forced into corruption in form of bribery, sexual harassment or exploitation to protect their livelihood.
- Due to cultural differences or gender roles, women might be more afraid of the consequences of engaging in corrupt behavior and therefore more likely to be compliant. Women tend to think more of their reputation and their image.
- Culturally, women may not have the same negotiation skills as their male counterparts as a way to negotiate their way out of punishment.

The World Custom Organization (WCO) Virtual Working Group on Gender Equality, Diversity and Integrity discusses the links between gender equality, inclusiveness and integrity – 16 Juli 2020



B.5. GENDER RESPONSIVE CAMPAIGN

FLEXIBLE WORKING SPACE (FWS) SEBAGAI BUDAYA KERJA BARU DI KEMENKEU

Sebagaimana KMK No. 223/KMK.01/2020 tentang Implementasi FWS di Kemenkeu, dimana FWS adalah pengaturan pola kerja pegawai yang memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawai serta menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dengan memberikan fleksibilitas lokasi kerja selama periode tertentu



Kemenkeu
pusdiklat keuangan umum
ngopi hitam

NGOBROL PINTAR HIDUP TAMBAH MANFAAT EPS. #30

Work From Home or Work Full Hours?

Kamis, 28 Januari 2021
Pukul 14:00 WIB. Via **zoom**
Meeting ID: 960 2926 7847
Passcode : ngopi
Invite Link : bit.ly/ngopieps30
& Pusdiklat Keuangan Umum

Bersama
Dr. Micha
Kepala Kalbe Learning Centre,
Psikolog Industri & Organisasi



B.5. GENDER RESPONSIVE CAMPAIGN

KEMENKEU MENGAJAR

Kemenkeu Mengajar adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai Kemenkeu yang mendaftar sebagai relawan (tanpa dibayar oleh APBN) untuk mengajarkan peran Kemenkeu dan mengenalkan nilai-nilai yang dibawa oleh Kemenkeu kepada pelajar.



Wamenkeu Mengajar
SDN Guntur 01 Pagi Jakarta, 4 November 2019





Cerita di KEMENKEU MENGAJAR Narasumber:



Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan RI

Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Najelaa Shihab
Tokoh Pendidik, Pengagias Semua Murid Semua Guru

Dian Sastrowardoyo
Produser, Pemain Film

Moderator :



Eliza Rahel
Relawan Kemenkeu Mengajar 2.0
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Tersedia e-Certificate

Berkerjasama Dengan :



reschedule

mengajar@kemenkeu.go.id  [kemenkeumengajar](https://www.facebook.com/kemenkeumengajar)  [kemenkeumengajar](https://www.youtube.com/kemenkeumengajar)  [@kemenkeumengajar](https://twitter.com/kemenkeumengajar)  [@kemenkeumengajar](https://www.instagram.com/kemenkeumengajar)



B.5. GENDER RESPONSIVE CAMPAIGN

WOMAN/GIRLS LEADERSHIP PROGRAM



PELUNCURAN WOMAN LEADERSHIP COACHING PROGRAM

TALKSHOW KARTINI:
EMPOWER A WOMAN-EMPOWER A NATION

Narasumber:



Sumiyati
Inspektur Jenderal



Chalimah Pujiastuti
Kepala Biro Perencanaan
dan Keuangan,



Heni Kartikawati
Kepala Pusdiklat
Keuangan Umum

Moderator



Rahayu Puspasari
Kepala Biro KLI

Selasa,
21 April 2020
13.30- 15.00WIB

LIVE STREAMING
www.kemenkeu.go.id/live

PRIME

professional - responsive - innovative - modern - enthusiastic

#BelajarTanpaBatas

WOMEN LEADERSHIP COACHING PROGRAM

Coaching bagi wanita Kemenkeu dalam
hal pemberdayaan wanita

Mulai 27 April 2020



Family
Financial Plan 101

Dapatkan inspirasi
dan trik bagaimana
mengelola keuangan
keluarga yang sesuai
dengan tujuan



Social Media Guidance
for Life Hack

Ketahui panduan
bermedsos yang mampu
meningkatkan kualitas diri
dan branding
profesionalmu



Stress & Anger
Management

Kuasai emosi diri di era
4.0 untuk mendukung
kehidupan pribadi,
keluarga, dan
profesional



GIRLS LEADERSHIP CLASS

Bersama Principal Mentor
Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI





B.5. GENDER RESPONSIVE CAMPAIGN

WOMAN/GIRLS LEADERSHIP PROGRAM



Sumber : Instagram, Facebook Sri Mulyani Indrawati

YAYASAN PLAN INTERNATIONAL INDONESIA **PLAN INTERNATIONAL** **GIRLS LEADERSHIP ACADEMY** **GIRLS GET EQUAL** **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Intergenerational Dialogue
WOMEN AND GIRLS:
GAME CHANGERS IN DEVELOPMENT**
Saturday, 6 March 2021 | 02.00-04.00 GMT+7
Registration: bit.ly/DialogGLP

SRI MULYANI INDRAWATI
Minister of Finance of Republic Indonesia
Principal Mentor of Girls Leadership Program

ANNE-BIRGITTE ALBRECHTSEN
Chief Executive Officer of Plan International

ALICE ALBRIGHT
Chief Executive Officer of the Global Partnership for Education

MODERATOR
DINI WIDIASTUTI
Executive Director of Yayasan Plan International Indonesia

GIRLS LEADER REPRESENTATIVES

DELLA
Co-Director of BeWithYou

BRELYANTIKA
Founder of Panti Carita

SILVIA
Chairwoman of SLB Ada Bisa dan Pasti Bisa

Supported By: **Partners:** **Media Partners:**

Menyambut International Women's Day, seluruh pegawai perempuan Eselon I - IV menghadiri kegiatan Leadership Program ini melalui Undangan UND-112/SJ/AH/2021

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

UND-112/SJ/AH/2021 05 Maret 2021

Revisi: 01
Sifat: Sifat
Lampiran: 1
Hal: 1

UND-112/SJ/AH/2021
Sifat: Sifat
Lampiran: 1
Hal: 1

Yth. 1. Sekretaris Inspektori Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Kelangkaan Barang
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
9. Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal
10. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
11. Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan
12. Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
13. Sekretaris Pengadilan Pajak
14. Sekretaris Komite Pengawasan Perpajakan
15. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
16. Kepala Biro/Unit/Lingkar Sekretariat Jenderal

Dalam rangka menyambut International Women's Day pada tanggal 8 Maret 2021 dan sehubungan dengan agenda Menteri Keuangan, dengan ini dimohon perkenan Saudara agar dapat menginformasikan kepada pegawai perempuan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup unit Saudara tempat dengan unit vertikal di daerah agar dapat hadir bergabung sebagai representasi Women Leaders Kementerian Keuangan pada kegiatan Intergenerational Dialogue "Women and Girls: Game Changers in Development" sebagai berikut:

Hari/Tanggal: Sabtu, 6 Maret 2021
Waktu: Pk. 14.00 WIB s.d. selesai
Media: Zoom meeting
Registrasi: bit.ly/DialogGLP
Dresscode: Casual
Rundown: Terlampir
Format Nama Display: Kementerian, Nama Lengkap
Virtual Background: https://bit.ly/GVS_GLP

Ditentukan kehadirannya pada agenda dimaksud 15 menit sebelum acara dimulai. Apabila pada saat jam noon sudah penuh, kindly dapat mengikuti Live Streaming melalui kanal Youtube Kementerian RI atau Facebook: Plan Indonesia.

Ditentukan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Saudara diharapkan terima kasih



B.5. GENDER RESPONSIVE CAMPAIGN

UMKM BANGKIT



Dialog dari Hati ke Hati, Menteri Keuangan Bersama Pejuang Ekonomi Pelaku UMKM di daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Ibu Kemenkeu Tahun 2020 - 22 Desember 2020



APBN mendukung UMKM agar mampu bangkit dari krisis pandemi melalui PEN. Pada tahun 2020 telah menyalurkan 173,17 triliun dan pada tahun 2021 telah dialokasikan 187,17 triliun.

Di Indonesia, 53,76% UMKM dimiliki oleh perempuan, dimana 97% karyawannya juga perempuan. Kementerian Keuangan mendukung penerapan kesetaraan gender melalui APBN yang responsif gender



KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER KEMENKEU

KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER
DAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

C



KEBIJAKAN EKSTERNAL RESPONSIF GENDER

1

UU NOMOR 16/2009 | NPWP BAGI PEREMPUAN MENIKAH

Pemerintah memberi kebebasan pilihan atas pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Bila perempuan yang telah menikah menghendaki memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya, bisa mengajukan permohonan NPWP.

DATA TERPILAH NPWP ORANG PRIBADI TAHUN 2017-2020

Jenis Kelamin	2017	2018	2019	2020
Laki-laki	15,473,657	19,262,359	21,729,553	31,593,360
Perempuan	8,506,758	9,935,500	11,104,800	18,978,989

2

PMK 90/PMK.06/2016 DIPERBARUI DG PMK -213/PMK.06/2020 | E-AUCTION

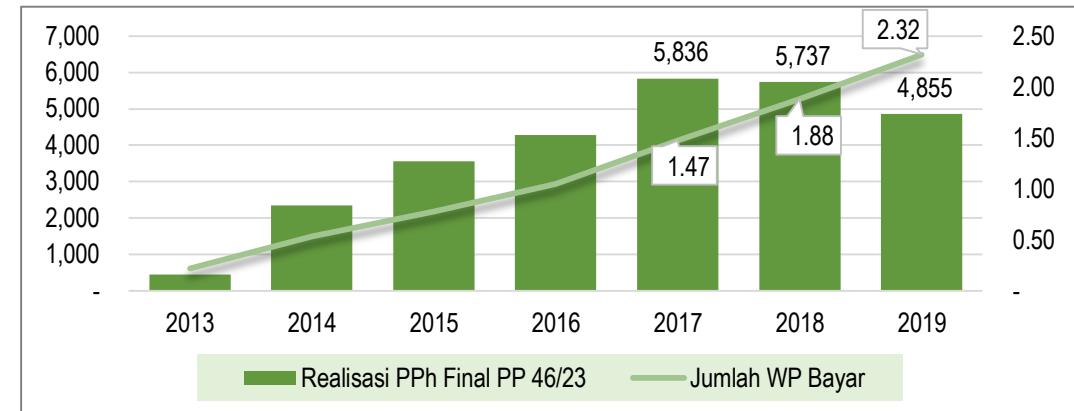
DATA TERPILAH PEMENANG E-AUCTION TAHUN 2015-2020

Jenis kelamin	2015	2016			2017			2018			2019			2020		
		Jumlah	Kenaikan	%	Jumlah	Kenaikan	%	Jumlah	Kenaikan	%	Jumlah	Kenaikan	%	Jumlah	Kenaikan	%
Laki-laki	3412	5651	2239	65.6213	12,984	7,333	129.765	5,425	-7,559	-58.218	19259	13,834	255.005	20638	1,379	7.16029
Perempuan	474	797	323	68.1435	1,673	876	109.912	1103	-649	-38.793	3854	2,751	249.411	3666	-188	-4.878

3

PP 23/2018 | PPh UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH

Penurunan tarif Pajak Penghasilan Final bagi pelaku UMKM, dari 1% (sebagaimana PP No 46 Tahun 2013) menjadi 0,5% dari omzet.



Jumlah Wajib Pajak UMKM yang melakukan pembayaran PPh Final atas Wajib Pajak dengan Penghasilan Bruto Tertentu (atau biasa dikenal dengan PPh Final PP 46/23) terus meningkat sejak diperkenalkan tahun 2013

Realisasi pembayarannya pun terus meningkat sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2018, realisasi ini menurun ketika tarif diturunkan dari 1% menjadi 0,5% sejak 1 Juli 2018

Penurunan realisasi PPh Final PP 46/23 tidak sebesar penurunan tarifnya yang sebesar 50% dikarenakan ada peningkatan jumlah Wajib Pajak.



KEBIJAKAN EKSTERNAL RESPONSIF GENDER

4 PMK-22/PMK.05/2017 | PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO

Pembiayaan UMi adalah fasilitas pembiayaan bagi usaha ultra mikro ≤10 juta yang belum difasilitasi perbankan. Umi dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah. Dengan jumlah Debitur (31/12/2020) sejumlah 3.440.045 dan realisasi sebesar Rp 11.050.789.136.287

Mayoritas Debitur Umi adalah perempuan (93,65%)

DATA TERPILAH DEBITUR PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO

Jenis Kelamin	2018	2019	2020	Total	Persentase
Laki-laki	66,816	50,630	100,882	218,328	6,35
Perempuan	797,329	759,296	1,665,092	3,221,717	93,65
	864,145	809,926	1,765,974	3,440,045	100,00

DATA SEKTOR USAHA DEBITUR PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO

Sektor Usaha	Debitur	Persentase
Industri pengolahan	27,604	0.80
Jasa	24,665	0.72
Perdagangan eceran	3,283,182	95.44
Perikanan, pertanian, perkebunan	104,594	3.04
	3,440,045	100.00

Sumber data Ditjen Perbendaharaan - 23 Februari 2021

5 PMK-61/PMK.07/2019 | INTERVENSI STUNTING

Dana transfer daerah untuk mendanai kegiatan operasional pelayanan publik. Merupakan dana bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk pencegahan stunting terintegrasi lintas sectoral hingga ke tingkat desa, dimulai dari kesehatan gizi, sanitasi, air minum (bersifat non fisik)

6 KAJIAN BKF | PENGANGGARAN IKLIM RESPONSIF GENDER



Perlunya integrasi perspektif gender dalam penyusunan mitigasi dan adaptasi dampak negatif perubahan iklim terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, difabel, dan lansia). Selaku K/L Driver PPRG, Kemenkeu Bersama KPPPA mengintegrasikan isu gender ke dalam pendanaan perubahan iklim



KEBIJAKAN **INTERNAL** RESPONSIF GENDER

1

PMK NO. 93/PMK.01/2018 | **POTONGAN TUKIN 0%**



Gugur
Kandungan
(20 hari kerja)



Paternity Leave
(10 hari kerja)



Cuti Melahirkan
(3 bulan)



Flexi time, haji,
cuti sakit, dll

2

SE-3/MK.1/2018 | **PENYEDIAAN SARANA KERJA
RESPONSIF GENDER DAN RAMAH ANAK**

Ibu Hamil &
Menyusui

- Ruang Laktasi
- Ruang Tunggu Prioritas
- Parkir dan Akses Masuk Prioritas
- Layanan Prioritas

Anak

- Tempat Bermain Anak
- Tempat Penitipan Anak

Disabilitas/
Lansia

- Toilet Difabel
- Ruang Tunggu Prioritas
- Layanan Prioritas
- Parkir dan Akses Masuk

Pegawai/
Stakeholder

- Ruang Transit
- Layanan kesehatan
- Kacamata Baca

3

SE-36/MK.01/2020 | **PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KERJA KEMENKEU**



Perlunya mekanisme yang dibangun secara kredibel dalam **penanganan tindak pelecehan seksual** yang berpotensi terjadi di institusi maupun korporasi untuk membangun suatu kultur yang dilandasi rasa saling menghormati serta menciptakan lingkungan kerja yang jauh lebih produktif.

Menteri Keuangan - Peringatan Hari Ibu Kementerian BUMN, 22 Desember 2019

4

SE-22/ MK.1/2020 | **SISTEM KERJA KEMENKEU PADA MASA TRANSISI
DALAM TATANAN NORMAL BARU**

Pengaturan pejabat/pegawai yang dapat menjalankan tugas kedinasan secara WFH dan/atau WFO dengan salah satunya mempertimbangkan kondisi kesehatan/faktor komorbiditas pegawai seperti:

- potensi pada usia yang lebih tua
- adanya penyakit penyerta
- adanya kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun
- ibu hamil, ibu yang baru melahirkan atau sedang menyusui

5

PENG-01/PANREK/2019 | **REKRUTMEN CPNS KEMENKEU TA 2019**

Formasi CPNS Kemenkeu memberi akses kepada penyandang disabilitas untuk mengajukan lamaran.



PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1 PMK NO. 156/PMK.07/2020 | **BLT DANA DESA**

Sebagaimana terakhir diubah dgn PMK No. 222/PMK.07/2020

Sasaran penerima BLT Dana Desa:

Sebanyak 8.045.861 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa pada tahun 2020

Diantaranya sebanyak 2.494.217 adalah termasuk dalam kategori Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Sumber : www.beritasatu.com

2 PMK NO. 110/PMK.03/2020 | **INSENTIF PPh FINAL UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH**

Pemberian insentif PPh Final pada pelaku UMKM (dengan kriteria WP berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018). Pajak yang biasanya sebesar 0.5% dari penghasilan bruto menjadi Ditanggung Pemerintah.

3 PMK NO. 85/PMK.05/2020 | **RELAKSASI UMi**

Bentuk pemberian relaksasi bagi penerima Pembiayaan UMi (Peraturan Direktur Utama PIP No.7/PIP/2020)

- Penundaan pembayaran pokok
- Pemberian masa tenggang

Target relaksasi Umi sebanyak **1,64 juta Debitur**, yaitu:

- Penundaan pokok sebanyak 1,02 juta Debitur, total plafon Rp2,95 Triliun senilai penundaan pokok Rp1,47 Triliun.
- Masa tenggang, sudah meraih 615 ribu Debitur dengan total plafon Rp1,89 Triliun sudah tersalur Rp946,95 Miliar.

Selain itu, target subsidi untuk 934,5 ribu Debitur dengan total plafond Rp2,6 Triliun sudah tersalur senilai Rp349,29 Miliar.

4 PMK NO. 197/PMK.07/2020 | **PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (DAK NON FISIK)**

Bagian dari dana transfer daerah untuk mendanai kegiatan operasional pelayanan publik. Merupakan dana bantuan pemerintah pusat untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang.



TERIMA KASIH

TIM PENGGERAK IMPLEMENTASI PUG KEMENTERIAN KEUANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

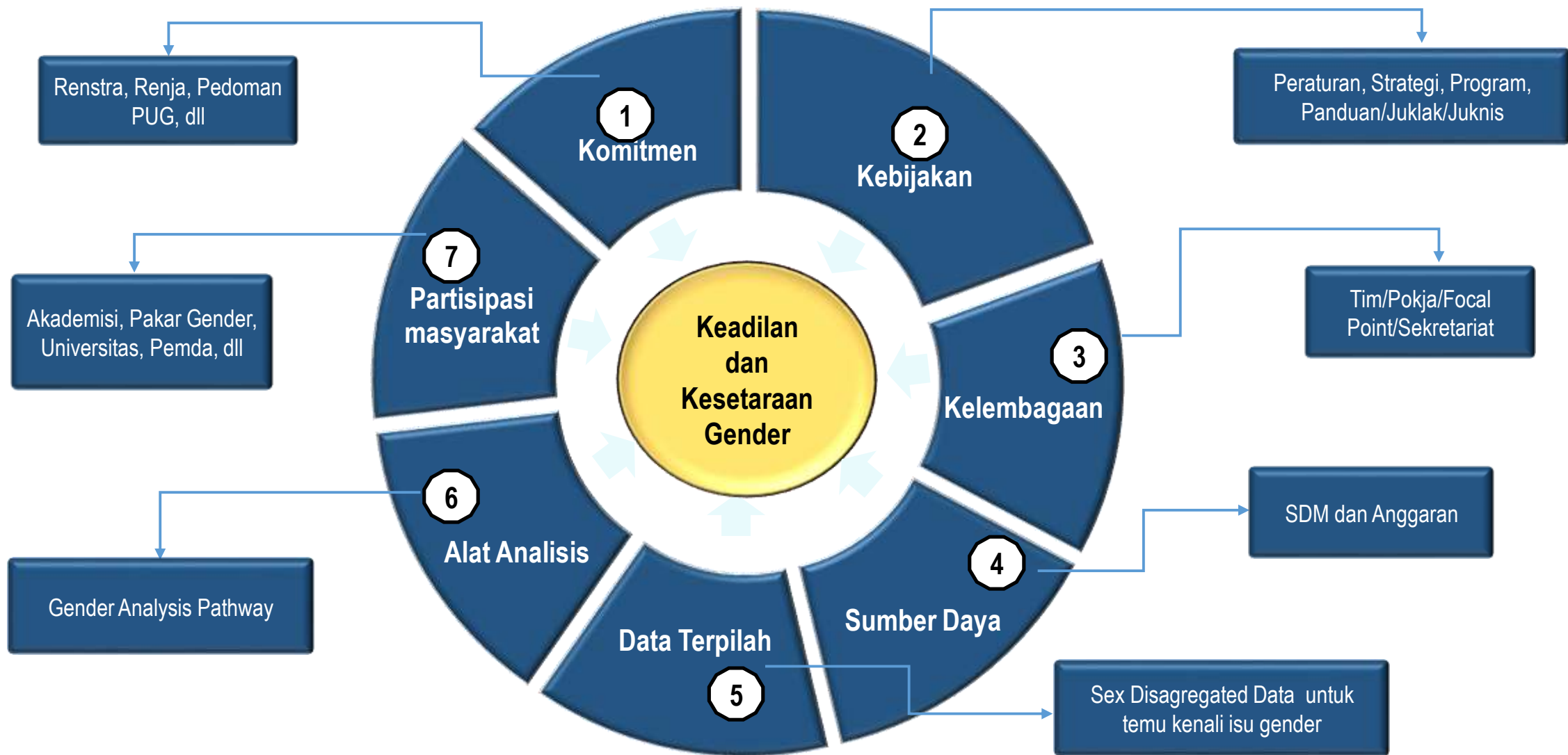
LAMPIRAN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN KEUANGAN

TIM PENGGERAK IMPLEMENTASI PUG KEMENTERIAN KEUANGAN

31 MARET 2021



7 PRASYARAT PUG KEMENKEU





KOMITMEN POLITIK

PRIORITAS ISU KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Rebirthing The Global Economy To Deliver Sustainable Development



“Pandemi menyerang sektor akar rumput, sektor informal, UMKM, orang miskin, dan khususnya gender wanita. Oleh karena itu, dalam mendesain *rebirthing* ekonomi, kita harus memperhatikan keempat ini.”

Menteri Keuangan, 1 Juli 2020

ADB-UN Women’s Virtual High-Level Roundtable



“Indonesia merancang respon dari Covid-19 ini dengan segala dimensi yang terkait tidak hanya gender tetapi juga tentang kemiskinan serta terkait kesetaraan gender. Perbaiki semua indikator yang terkait dengan partisipasi gender merupakan sesuatu yang harus didukung.”

Menteri Keuangan, 10 September 2020



KOMITMEN POLITIK

PRIORITAS ISU KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

The UN Women Asia Pacific Women Empowerment Principles (WEP's) Awards Ceremony in Indonesia

“Ketika tidak mau menyelesaikan masalah ketimpangan gender, dunia akan kehilangan US\$23 triliun atau lebih dari 12x perekonomian Indonesia. Sementara, potensi kehilangan di Asia-Pasifik sebesar US\$4,5 triliun. Kesetaraan gender adalah PR kita bersama. Selain untuk memakmurkan masyarakat, tapi juga untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.”

Menteri Keuangan,
18 November 2020



Toronto Centre Live Webinar Post Covid-19 Crisis: Implications for Financial Stability, Financial Inclusion, Gender Equality, and International Development



“Salah satu langkah kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemic Covid-19 adalah dengan memberi restrukturisasi untuk kredit UMKM selama 6 bulan, khususnya kredit Ultra Mikro. Ini penting dilakukan karena di Indonesia banyak dari para peminjam modal adalah wanita.”

Menteri Keuangan,
29 Juni 2020



KOMITMEN POLITIK

PRIORITAS ISU KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

THE UN WOMEN ASIA PACIFIC WOMEN EMPOWERMENT PRINCIPLES (WEP'S) AWARDS CEREMONY IN INDONESIA- 18 NOVEMBER 2020

Pemberdayaan Perempuan dan Ekonomi Nasional

3 kunci peran perempuan dan human capital:

- Berinvestasi pada SDM akan meningkatkan kualitas masa depan bangsa,
- Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan penting dalam memperkuat perekonomian nasional, serta
- Peran perempuan merupakan kunci untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan bersama bagi semua pihak.



Pemberdayaan Perempuan dan Ekonomi Nasional

KESENJANGAN GENDER DI DUNIA KERJA

- Sejak pandemi, tingkat partisipasi kerja perempuan naik 1,32% dari 51,81% (2019) menjadi 53,13% (2020).
- Ketimpangan upah di Indonesia sebesar 27% lebih tinggi dari ketimpangan upah di dunia sebesar 20%.
(sumber: Sakernas Agustus 2020).

Pemberdayaan Perempuan dan Ekonomi Nasional

MANFAAT EKONOMI DARI KESETARAAN GENDER

- Pemberdayaan perempuan menjadi penting karena lebih dari sekedar baik secara moral tetapi juga baik dari sisi kebijakan makro fiskal.
- Ekonomi global berpotensi kehilangan USD12 triliun pada tahun 2025 jika tidak menyelesaikan isu ketimpangan gender, sementara Kawasan Asia Pasifik berpotensi kehilangan USD4,5 triliun.
- Mengatasi isu ketimpangan gender akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Pemberdayaan Perempuan dan Ekonomi Nasional

- Perlindungan sosial diberikan melalui program bantuan tunai bersyarat yaitu PKH yang diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat melalui perempuan sebagai pengurus keluarga.
- Bantuan permodalan UMKM khususnya dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ultra Mikro, dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Untuk Ultra Mikro dan Mekaar sebagian besar dijalankan oleh Perempuan.

Sumber :
Instagram @smindrawati
Facebook @Sri Mulyani Indrawati



KOMITMEN PIMPINAN

PRIORITAS ISU KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “Kesetaraan Gender Memperkuat Perekonomian Bangsa”

Menteri Keuangan, 24 April 2019



Webinar Perempuan Berdaya
Indonesia Maju: “Refleksi Awal Tahun, Quo Vadis Perempuan Indonesia”

Indonesia berada di peringkat 85 dalam Indeks Global Gender Gap, meningkat 28 peringkat dibanding tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan tren positif dari partisipasi perempuan dalam ekonomi, kesehatan, dan tingkat pendidikan. Namun dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan bagi partisipasi perempuan, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.

Menteri Keuangan, 5 Januari 2021



Webinar Menuju Planet 50:50

Kontribusi Bisnis pada Pencapaian SDG’s
“APBN sebagai instrumen keuangan negara mengenali pentingnya kesetaraan gender. Salah satu inisiatif baru pada tahun 2021 adalah mengenalkan sebuah dana alokasi khusus nonfisik yang didedikasikan untuk dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak.”

Menteri Keuangan, 16 Desember 2020



KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER

NO	K/L	ALOKASI	
		2018	2019
1	010 KEMENDAGRI	79,687,800,000	48,997,557,000
2	011 KEMENLU	6,005,568,000	10,588,760,000
3	015 KEMENKEU	794,032,604,000	803,356,088,000
4	018 KEMENTAN	11,710,533,000	22,295,524,000
5	020 KEMEN ESDM	8,689,382,000	1,365,361,862,000
6	022 KEMENHUB	16,556,805,388,000	12,904,113,016,000
7	024 KEMENKES	201,970,071,000	55,165,946,000
8	025 KEMENAG	2,129,480,000	162,962,375,000
9	026 KEMENAKER	8,000,605,000	8,372,996,000
10	027 KEMENSOS	1,226,350,000	10,306,868,000
11	029 KEMEN LHK	117,746,181,000	3,241,110,890,000
12	032 KEMEN KP	-	152,243,202,000
13	033 KEMEN PU & PERA	117,216,171,000	37,510,145,661,000
14	036 KEMENKO KESRA	-	5,925,000,000
15	044 KEMEN KOP & UKM	2,696,525,000	2,671,224,000
16	047 KEMEN PP & PA	248,068,593,000	102,404,259,000
17	048 KEMEN PAN RB	6,750,000,000	5,500,000,000
18	054 BPS	118,140,000	79,875,000
19	059 KEMENKOMINFO	1,329,900,000	1,065,870,000
20	063 BPOM	55,173,872,000	43,157,173,000
21	064 LEMHANNAS	-	49,672,307,000
22	067 KEMEN DES PDPT	-	79,738,710,000
23	068 BKKBN	1,565,051,864,000	331,063,642,000
24	079 LIPI	23,149,382,000	4,000,000,000
25	086 LAN	184,985,000	-
26	103 BNPB	6,752,376,607,000	128,821,512,000
27	104 BNP2TKI	236,475,000	27,981,123,000
JUMLAH		26,560,356,476,000	57,077,101,440,000

ANGGARAN RESPONSIF GENDER BAGI K/L

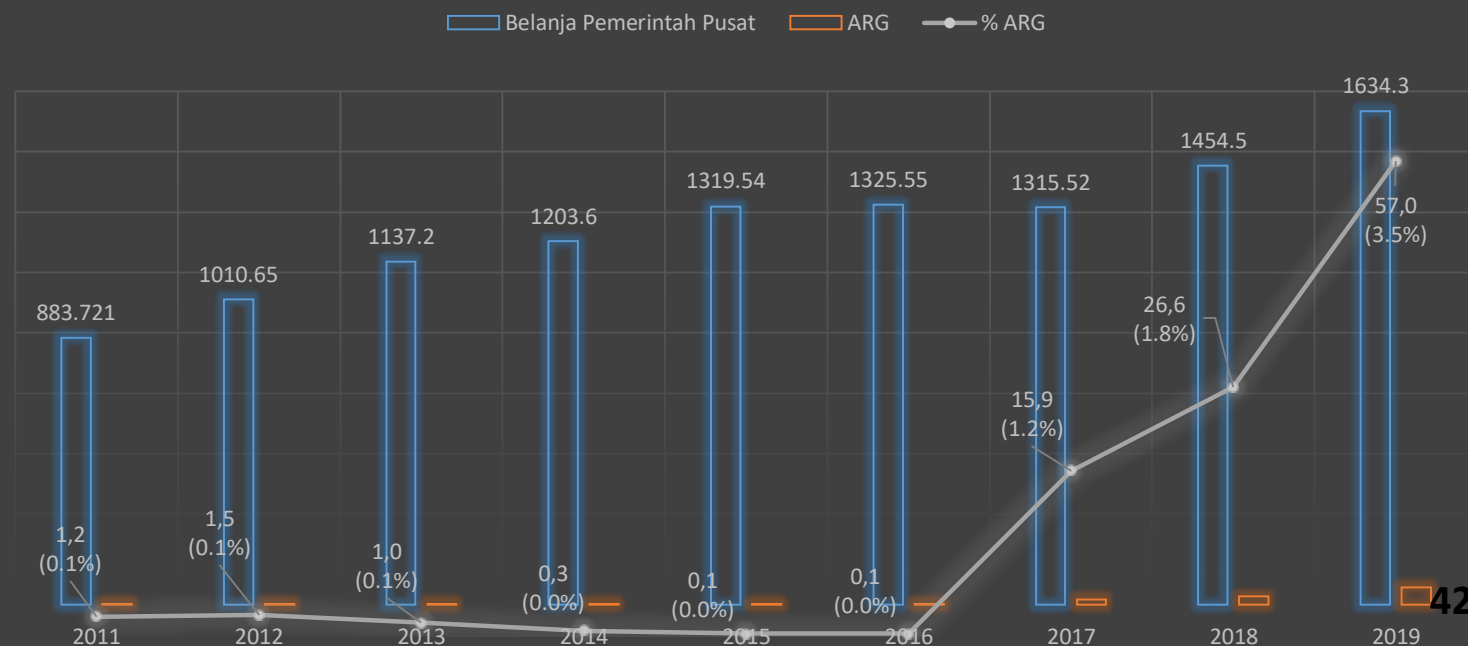
PMK 208/PMK.02/2020

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA

Peraturan Dirjen Anggaran No. 5/AG/2020

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA

PERKEMBANGAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER
2011-2019 (Triliun Rp)





KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER

NPWP BAGI PEREMPUAN MENIKAH

UU Nomor 16 Tahun 2009
Tentang
Perubahan ke-4 atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



Pemerintah memberi kebebasan pilihan atas pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Bila wanita yang menikah menghendaki memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya, bisa dengan mudah mengajukan permohonan NPWP. Saat ini pendaftaran bisa melalui pendaftaran NPWP online.



NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang wajib dimiliki Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan usaha sebagai sarana administrasi perpajakan serta identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.



Data Terpilah NPWP Orang Pribadi

Jenis Kelamin	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Laki-Laki	15,473,657	19,262,359	21,729,553	31,593,360
Perempuan	8,506,758	9,935,500	11,104,800	18,978,989

Data SI - DJP per 10 Desember 2020

Dampak kebijakan
Terjadi peningkatan jumlah Wajib
Pajak perempuan





KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER

PPH UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH

PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018

Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu



PMK NO. 110/PMK.03/2020

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

SETENGAH PERSEN
SEPENUH HATI



Penurunan tarif Pajak Penghasilan Final bagi pelaku UMKM, dari 1% (sebagaimana PP-46/2013) menjadi 0,5% dari omzet.



Pemberian insentif PPh Final pada pelaku UMKM (dgn kriteria WP berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018). Pajak yang biasanya sebesar 0.5% dari penghasilan bruto menjadi Ditanggung Pemerintah.

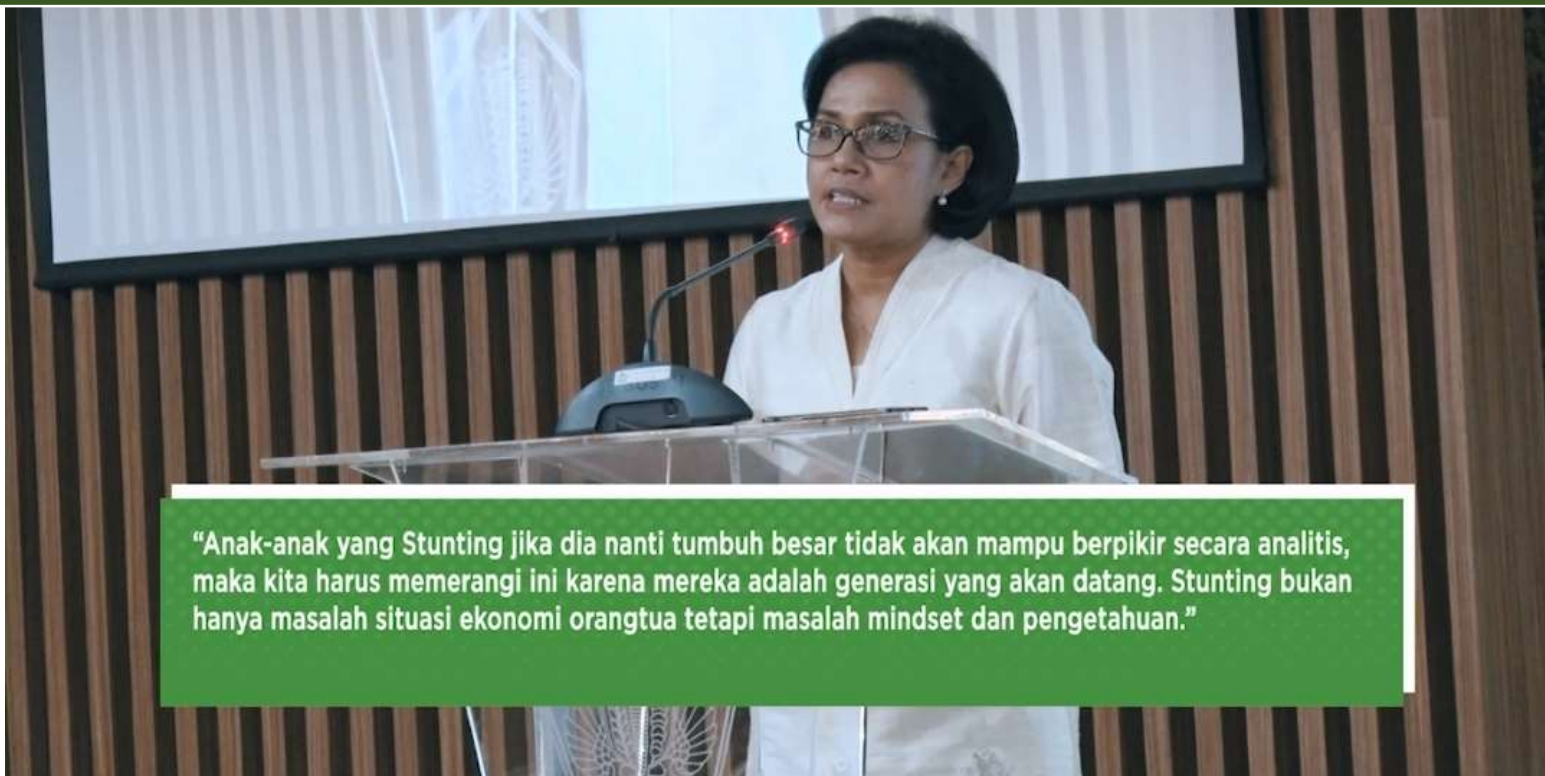


KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER

DUKUNGAN TRANSFER UNTUK INTERVENSI STUNTING



PMK Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Mendukung Kegiatan Intervensi Stunting Terintegrasi



“Anak-anak yang Stunting jika dia nanti tumbuh besar tidak akan mampu berpikir secara analitis, maka kita harus memerangi ini karena mereka adalah generasi yang akan datang. Stunting bukan hanya masalah situasi ekonomi orangtua tetapi masalah mindset dan pengetahuan.”

PENUHI KEBUTUHAN GIZI

Cegah Stunting



Manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Pemerintah berkomitmen menurunkan angka prevalensi stunting dari 30,8 (baseline tahun 2018) menuju 19 pada tahun 2024.



KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER

KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH

PMK No. 177/PMK.04/2016 dan
Peraturan Direktur Jenderal BC No. Per-01/BC/2017 Tentang
Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) bagi Industri
Kecil dan Menengah (IKM)

“Pemerintah perlu mendorong usaha IKM agar mempunyai daya saing yang lebih kuat di pasar global. Kemenkeu menerbitkan peraturan yang bersifat khusus atau spesifik yang didalamnya memberikan kemudahan mengimpor bahan baku, dan barang modal tanpa membayar bea masuk dan pajak impor, persyaratan perizinan yang mudah dan tidak diwajibkannya laporan surveyor pada saat impor.”

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, peluncuran KITE IKM
30 Januari 2017, Boyolali Jawa Tengah



Pemerintah mengembangkan fasilitas insentif fiskal, kemudahan skema dan persyaratan kepabeaian bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk menjadikan biaya produksi atas barang jadi yang diekspor dapat ditekan lebih rendah melalui kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) IKM.



KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER

PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMi)

PMK-22/PMK.05/2017

TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMI)

Pembiayaan Ultra Mikro adalah Fasilitas pembiayaan yg mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro dibawah 10 juta yang belum difasilitasi perbankan. Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ditunjuk sebagai koordinator UMi.



Dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Debitur UMi mendapat keringanan berupa subsidi bunga/subsidi margin dan relaksasi berupa penundaan kewajiban pokok dan pemberian masa tenggang pembayaran kewajiban pokok selama 6 bulan.



PMK-85/PMK.05/2020

Pemberian Subsidi Bunga atau Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Ultra Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

PERATURAN DIREKTUR UTAMA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH NOMOR 7/PIP/2020

Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Utama PIP Nomor 5/PIP/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Relaksasi Bagi Penerima Pembiayaan Ultra Mikro Terdampak Pandemi Covid-19

Sejak diluncurkan tahun 2017 hingga bulan Juli 2020 telah membantu 2.257.021 debitur yang mayoritas debitur perempuan (93%).



KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER

LELANG SECARA ELEKTRONIK (E-AUCTION)

PMK Nomor 90/PMK.06/2016

Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet



PMK Nomor 213/PMK.06/2020

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

- Untuk meningkatkan kualitas pelayanan lelang kepada pengguna jasa lelang, lelang e-Auction merupakan layanan unggulan.
- Proses berjalannya lelang hanya melalui website yang bisa diakses dengan mudah oleh para pengguna layanan lelang dari seluruh Indonesia.
- Pelaksanaan lelang menjadi efektif, transparan, adil, dan menjamin kepastian hukum.
- Lelang e-Auction memperluas akses dan partisipasi stakeholder, terutama bagi perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas



Lelang yang dilaksanakan dengan penawaran melalui Aplikasi Lelang, kehadiran Penjual dapat dilakukan melalui sarana media elektronik yang memungkinkan Pejabat Lelang dan Penjual dapat saling mendengar dan melihat secara langsung dalam pelaksanaan lelang.



KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

PMK-222/PMK.07/2020

Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah mengantisipasi dampak ekonomi atas pandemi COVID-19 melalui instrumen Jaring Pengaman Sosial (social safety net) yang salah satunya berbentuk Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa (BLT Desa).

BLT Desa diperuntukkan bagi keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan harus dipastikan bahwa calon penerima BLT Desa tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.





KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER

PMK NOMOR 93/PMK.01/2018

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PMK NOMOR 214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Integrasi persepsi gender dalam kriteria pemberian potongan Tunjangan Kinerja sebesar 0%



Cuti Melahirkan
paling lama **3 bulan**

Pegawai wanita yang **mengalami gugur kandungan** namun tidak menjalani rawat inap untuk paling lama **20 hari kerja**

Pegawai yang menjalani cuti sakit karena **kecelakaan kerja** untuk paling lama **1 tahun 6 bulan**



Pegawai yang sakit dan **dirawat jalan** maksimal 3 hari kerja, dan maksimal 25 hari kerja bagi yang **rawat inap**

Flexi time kerja, baik flexi mundur maupun maju sebesar **30 menit**, berlangsung secara nasional

Paling lama **10 hari kerja**, bagi **Pegawai laki-laki** yang menjalani cuti mendampingi istri yang melahirkan

Pegawai yang melaksanakan perjalanan haji



Pegawai yang sedang mengalami musibah (keluarga meninggal, keluarga sakit keras, mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam) paling lama **5 hari kerja**





KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER

SE NOMOR 36/MK.01/2020

PENCEGAHAN DAN DUKUNGAN PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KERJA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN



“Perlunya mekanisme yang dibangun secara kredibel dalam penanganan tindak pelecehan seksual yang berpotensi terjadi di institusi maupun korporasi untuk membangun suatu kultur yang dilandasi rasa saling menghormati serta menciptakan lingkungan kerja yang jauh lebih produktif.”

Menteri Keuangan
Peringatan Hari Ibu Kementerian BUMN
Tanggal 22 Desember 2019

Tujuan Penetapan SE Nomor 36/MK.1/2020

- 
- 1 Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender melalui upaya preventif berupa pencegahan diskriminasi gender yang dapat disebabkan oleh Pelecehan Seksual di lingkungan kerja
 - 2 Meningkatkan kesadaran seluruh pegawai Kementerian Keuangan terhadap bentuk-bentuk Pelecehan Seksual di lingkungan kerja.
 - 3 Melindungi seluruh pegawai Kementerian Keuangan, baik laki-laki dan perempuan, dari segala bentuk Pelecehan Seksual dalam rangka pemenuhan hak atas keamanan dan kenyamanan bekerja
 - 4 Memberik penanganan, pelayanan, dan pemulihan korban pelecehan seksual dengan memastikan adanya langkah-langkah tepat dalam rangka penanganan tindakan Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap pegawai
 - 5 Meningkatkan kinerja pegawai serta menjaga citra Kementerian Keuangan.



KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN PENANGANAN COVID-19

Program Komprehensif Menyelamatkan Jiwa dan Perekonomian

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020

Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2020

Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2020

Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional



KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN PENANGANAN COVID-19

1

Bidang Anggaran Negara

PERPRES NO. 54 TAHUN 2020

Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

PMK NO. 38/PMK.02/2020

Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Ekonomi Nasional

PMK NO. 185/PMK.02/2020

Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional

2

Bidang Perpajakan

PMK NO. 29/PMK.03/2020

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019

PMK NO. 110/PMK.03/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

PMK NO. 239/PMK.03/2020

Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Covid 19 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan COVID-19



PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN PENANGANAN COVID-19

3

Bidang Kepabeanan dan Cukai

PMK NO. 31/PMK.04/2020

Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (Corona Virus Disease 2019/ Covid-19)

PMK NO. 148/PMK.04/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2016 tentang Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara dalam rangka Kepabeanan dan Cukai secara Elektronik

PMK NO. 45/PMK.04/2020

Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal atau Invoice Declaration Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional Selama Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)

PMK NO. 149/PMK.04/2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19)

PMK NO. 134/PMK.010/2020

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

PMK NO. 188/PMK.04/2020

Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)



KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN PENANGANAN COVID-19

4

Bidang Perbendaharaan

PMK NO. 43/PMK.05/2020

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

PMK NO. 107/PMK.05/2020

Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

PMK NO. 103/PMK.05/2020

Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

PMK NO. 138/PMK.05/2020

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

PMK NO. 04/PMK.05/2020

Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

PER DIREKTUR UTAMA PIP No PER-7/PIP/2020

Perubahan atas PER. Dirut PIP No. PER-5/PIP/2020 tentang Tata Cara pemberian Relaksasi bagi Penerima Pembiayaan Ultra Mikro Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)



KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN PENANGANAN COVID-19

5

Bidang Perimbangan Keuangan

PMK NO. 19/PMK.07/2020

Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

PMK NO. 105/PMK.07/2020

Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah

PMK NO. 46/PMK.07/2020

Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19) dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

PMK NO. 145/PMK.07/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

PMK NO. 87/PMK.07/2020

Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020

PMK NO. 156/PMK.07/2020

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

PMK NO. 101/PMK.07/2020

Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

PMK NO. 219/PMK.07/2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional



KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN PENANGANAN COVID-19

6

Bidang Kekayaan Negara

PMK No. 118/PMK.06/2020

Tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

8

Bidang Fiskal

PMK NO. 19/PMK.07/2020

Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

7

Bidang Pembiayaan

PMK No. 71/PMK.08/2020

Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

9

Bidang Pengawasan

PMK No. 75/PMK.09/2020

Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

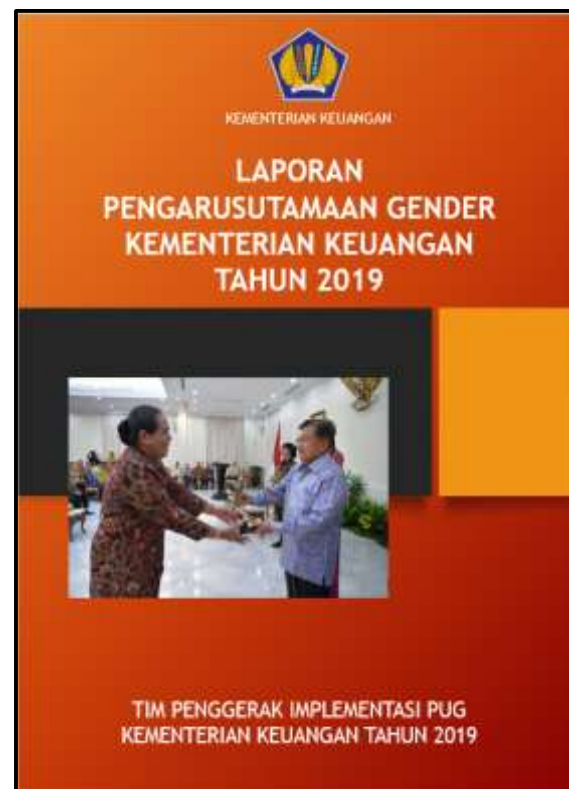
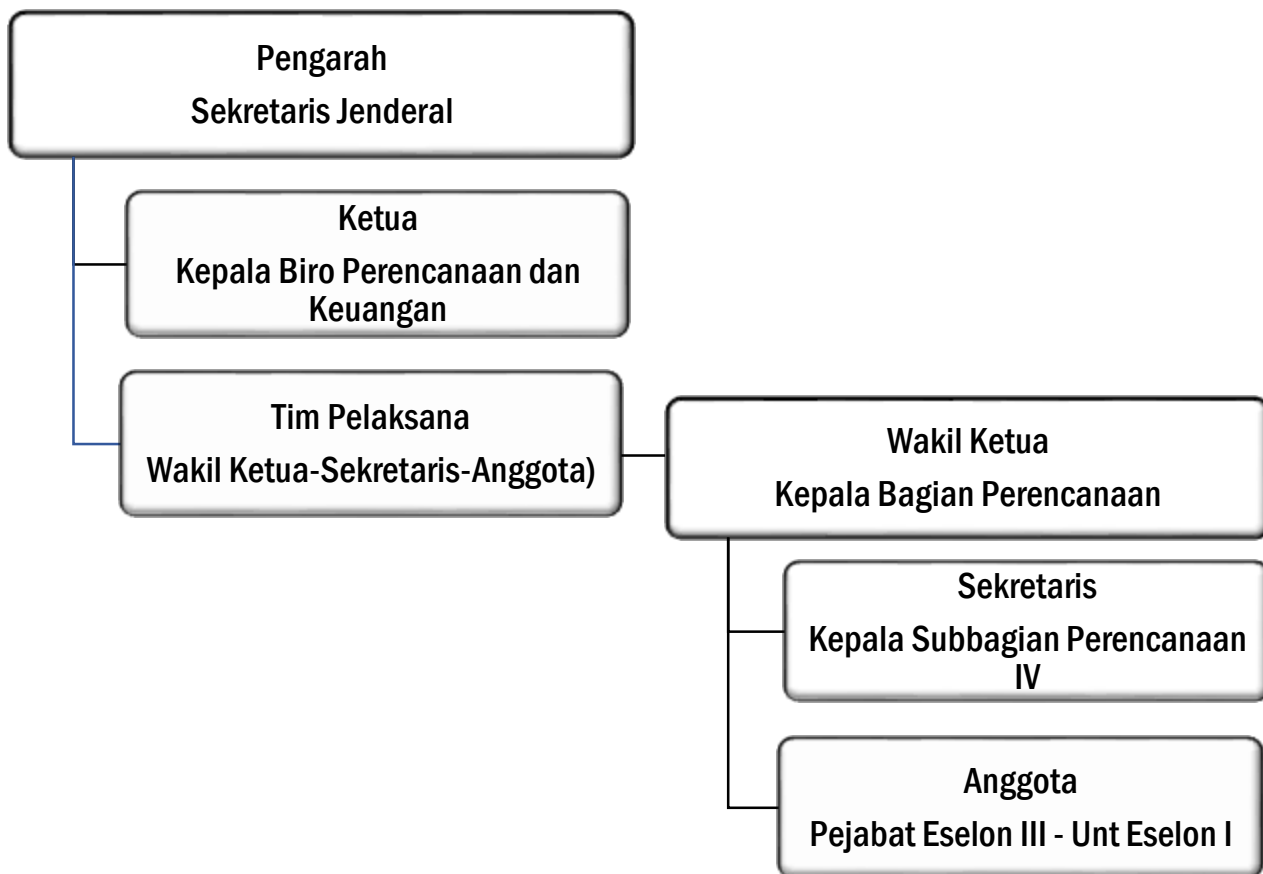


KELEMBAGAAN PUG

TIM PENGGERAK IMPLEMENTASI PUG KEMENKEU

KEPUTUSAN SEKJEN NOMOR KEP-178/SJ/2019 dan KEPUTUSAN SEKJEN NOMOR KEP-93/SJ/2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN





KELEMBAGAAN PUG

RENCANA KERJA TIM PENGGERAK IMPLEMENTASI PUG KEMENKEU

NO	KEGIATAN	TARGET WAKTU	RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PUG KEMENKEU TA 2019											
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pembentukan Tim PUG Kementerian Keuangan Tahun 2019	Jan												
2	Rapat Koordinasi Tim PUG Semester I Kementerian Keuangan	Feb												
3	Persiapan Lomba Implementasi PUG Kementerian Keuangan	Feb-Apr												
4	Sosialisasi PUG Tahun 2019	Apr-Nov												
5	Penyusunan Revisi Buku Panduan Implementasi PUG Kementerian Keuangan	Jul-Agt												
6	Daycare Seasonal Kemenkeu Tahun 2019	Jun												
7	Melakukan penilaian dan penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Lomba Implementasi PUG Kemenkeu	Jul-Sept												
8	Penyusunan Buku Praktik-Praktik Baik Implementasi PUG Satuan Kerja Pemenang Lomba PUG 2015-2019	Nov-Des												
9	Rapat Koordinasi Tim PUG Semester II 2019 Kementerian Keuangan	Nov												
10	Penyusunan Laporan PUG Kementerian Keuangan Tahun 2019	Des												

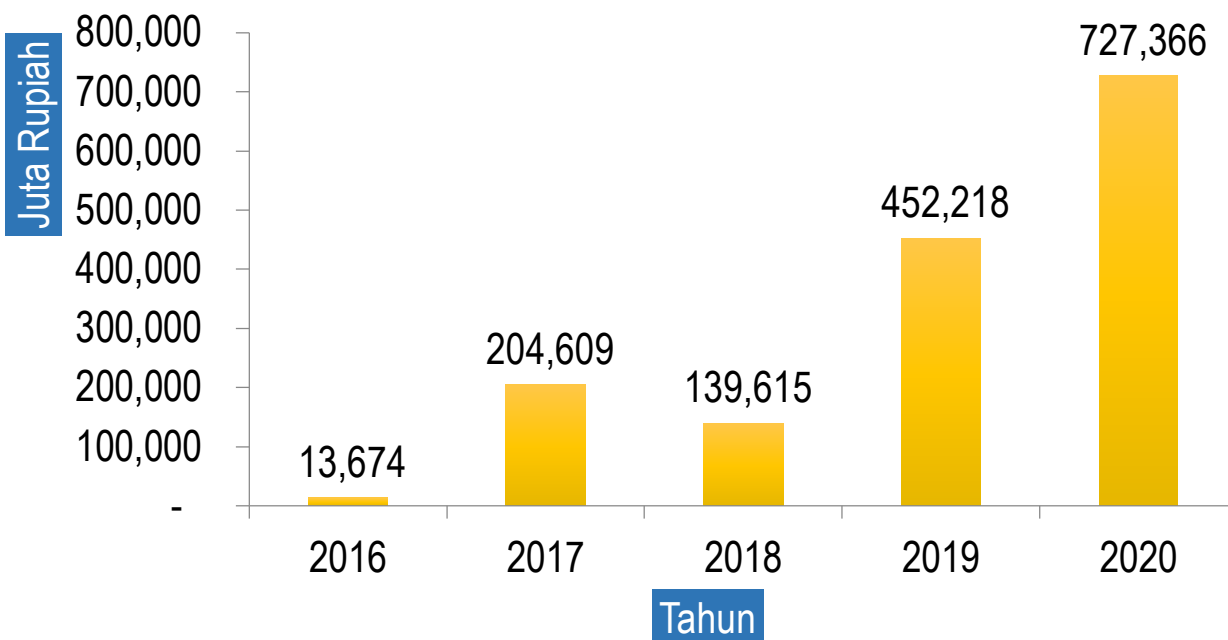
NO	KEGIATAN	TARGET WAKTU	RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2020											
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pembentukan Tim PUG Kemenkeu Tahun 2020	Jan												
2	Penyusunan SE Pencegahan dan Dukungan Penanganan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kerja	Feb-Okt												
3	Rapat Koordinasi Tim PUG Semester I Th 2020	Feb												
4	Persiapan Pelaksanaan Lomba Implementasi PUG Kemenkeu	Feb-Apr												
5	Pelaksanaan e-Learning PPRG Kemenkeu	Mei-Sep												
6	Pembangunan Aplikasi SIPEGIKU dan Sosialisasi APLIKASI SIPEGIKU	Jul-Sep												
7	Daycare Seasonal Kemenkeu Tahun 2019	Mei												
8	Melakukan penilaian dan penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Lomba Implementasi PUG Kemenkeu	Jul-Sept												
9	Pengumpulan data dan input isian Aplikasi APE KPPPA 2020	Juli-Okt												
10	Launching SE Pencegahan dan Dukungan Penanganan Pelecehan Seksual dalam rangkaian peringatan hari Ibu kemenkeu	Des												
11	Rapat Koordinasi Tim PUG Semester II 2019 Kementerian Keuangan	Nov												
12	Penyusunan Laporan PUG Kementerian Keuangan Tahun 2019	Des												



SUMBER DAYA

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) KEMENKEU TAHUN 2016-2020

ARG Kemenkeu Tahun 2016 -2020



PENDANAAN LEMBAGA DONOR PADA KEGIATAN RESPONSIF GENDER

1. *PFM MDTF - World Bank*
 - PFM MDTF Phase 2 (PEFA Gender Assessment)
 - PFM MDTF Phase 3 (Gender Responsive PFM)
2. *PROSPERA - The Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)*
 - Gender and Social Inclusion
 - Gender equality & inclusion for strong, sustainable & inclusive growth)
3. *Sustainable Development Financing – United National Development Programme (UNDP)*



SUMBER DAYA

PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA PUG KEMENKEU

DATA PESERTA KIE PUG KEMENKEU TAHUN 2010-2020

TAHUN	JUMLAH LOKASI	JABATAN				PENDIDIKAN				JENIS KELAMIN	
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF	S2	S1	DIPLOMA	SMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
2010	9	0	12	95	239	25	119	98	104	203	143
2011	12	0	18	82	359	40	138	138	143	240	219
2012	7	0	3	46	208	23	82	90	62	127	130
2013	5	25	4	21	125	36	54	46	39	69	106
2014	4	0	6	29	106	15	52	54	20	58	83
2015	6	0	5	52	127	23	89	43	29	93	91
2016	8	0	6	79	132	47	94	51	25	102	115
2017	5	0	4	25	156	15	48	80	42	106	79
2018	6	0	3	60	90	27	39	44	45	87	68
2019	10	3	33	60	135	40	40	16	0	50	46
2020	e-learning									1467	506
Jumlah	72	28	94	549	1,677	291	755	660	509	2,602	1,586
TOTAL PESERTA KIE PUG KEMENKEU										4,188	



SUMBER DAYA

PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA PUG KEMENKEU

DATA LOKASI SOSIALISASI PUG KEMENKEU TAHUN 2019



BATAM



PONTIANAK



PADANG



KENDARI



JAYAPURA



MATARAM



PEKANBARU



SERANG



DATA TERPILAH

DATA TERPILAH SDM KEMENKEU

No	Jenjang Jabatan	Pria	Wanita	Total
1	Eselon I.A	10	1	11
2	Eselon I.B	7	2	9
3	Eselon II.A	172	31	203
4	Eselon II.B	14	3	17
5	Eselon III.A	1.376	284	1.660
6	Eselon III.B	48	5	53
7	Eselon IV.A	7.247	1622	8.869
8	Eselon IV.B	217	14	231
9	Eselon V.A	8	3	11
10	Non Eselon	46.570	23.844	70.414
Total		55.669	25.809	81.478
Persentase (%)		68%	32%	100%

Sumber data Biro SDM 31 Desember 2020

DATA TERPILAH PEJABAT KEMENKEU

No	Jenjang Jabatan	Pria	Wanita	Total
1	Eselon I	17	3	20
3	Eselon II	186	34	220
Total		203	37	240
Persentase (%)		85%	15%	100%

Sumber data Biro SDM 15 Maret 2021



DATA TERPILAH

STAKEHOLDER DEBITUR ULTRA MIKRO (UMI)

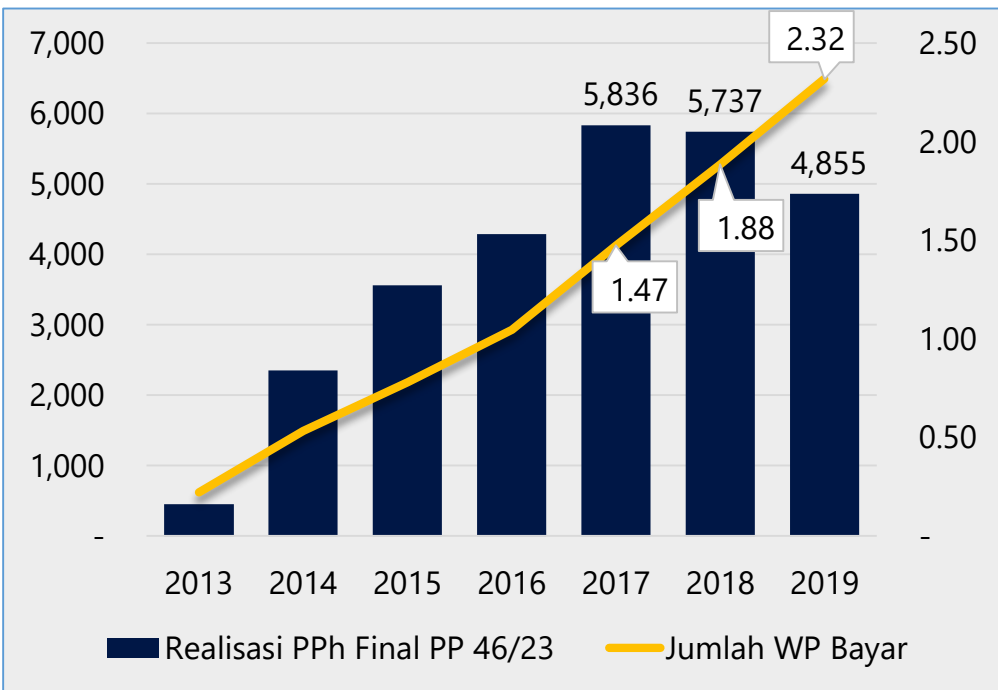




DATA TERPILAH

STAKEHOLDER NPWP UMKM

PP NO. 23/TAHUN 2018 MENGGANTIKAN PP NO. 46/2013
TARIF PAJAK DIPANGKAS 50%, MENJADI 0,5% DARI OMZET



- Jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas PPh Final atas Wajib Pajak dengan Penghasilan Bruto Tertentu (atau biasa dikenal dengan PPh Final PP 46/23) terus meningkat sejak diperkenalkan tahun 2013
- Realisasi pembayarannya pun terus meningkat sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2018, realisasi ini menurun ketika tarif diturunkan dari 1% menjadi 0,5% sejak 1 Juli 2018
- Penurunan realisasi PPh Final PP 46/23 tidak sebesar penurunan tarifnya yang sebesar 50% dikarenakan ada peningkatan jumlah Wajib Pajak Bayar

DATA NPWP UMKM TAHUN 2020

No.	Jenis NPWP UMKM	Jumlah
1	WP bayar PP-23/2018	3,237,057
2	WP bayar PP-23/2018 dan Pasal 25	683,317
3	WP bayar Pasal 25	640,824
4	WP tidak lapor	7,123,059
Jumlah WP UMKM		11,684,257

Meski penurunan pajak mengurangi penerimaan pajak sementara waktu, kebijakan tersebut terbukti mendorong kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dengan meningkatnya jumlah pembayar pajak.

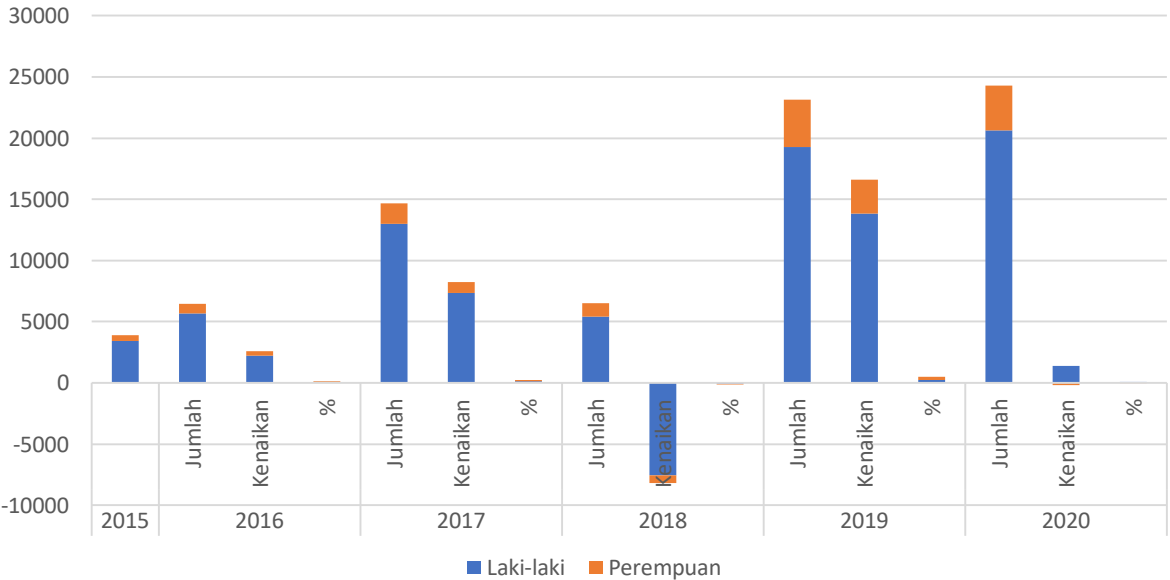


DATA TERPILAH

STAKEHOLDER PEMENANG LELANG TAHUN 2015-2020

Jenis kelamin	2015	2016			2017			2018			2019			2020		
		Jumlah	Kenaikan	%	Jumlah	Kenaikan	%	Jumlah	Kenaikan	%	Jumlah	Kenaikan	%	Jumlah	Kenaikan	%
Laki-laki	3412	5651	2239	65.6213	12,984	7,333	129.765	5,425	-7,559	-58.218	19259	13,834	255.005	20638	1,379	7.16029
Perempuan	474	797	323	68.1435	1,673	876	109.912	1103	-649	-38.793	3854	2,751	249.411	3666	-188	-4.878

DATA TERPILAH PEMENANG LELANG



e-Auction
lelang jadi lebih mudah
Ikut lelang bisa dilakukan kapan pun, di mana pun!

Segera kunjungi
www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id

DJKN
1500-991
Call Center DJKN

www.djkn.kemenkeu.go.id @djknkemenkeu

Sebagai salah satu layanan unggulan, Lelang menjadi lebih mudah dan aman melalui e-Auction. Proses lelang melalui website, yang bisa diakses oleh pengguna lelang dimanapun. Peserta lelang tidak perlu menghadiri pelelangan.

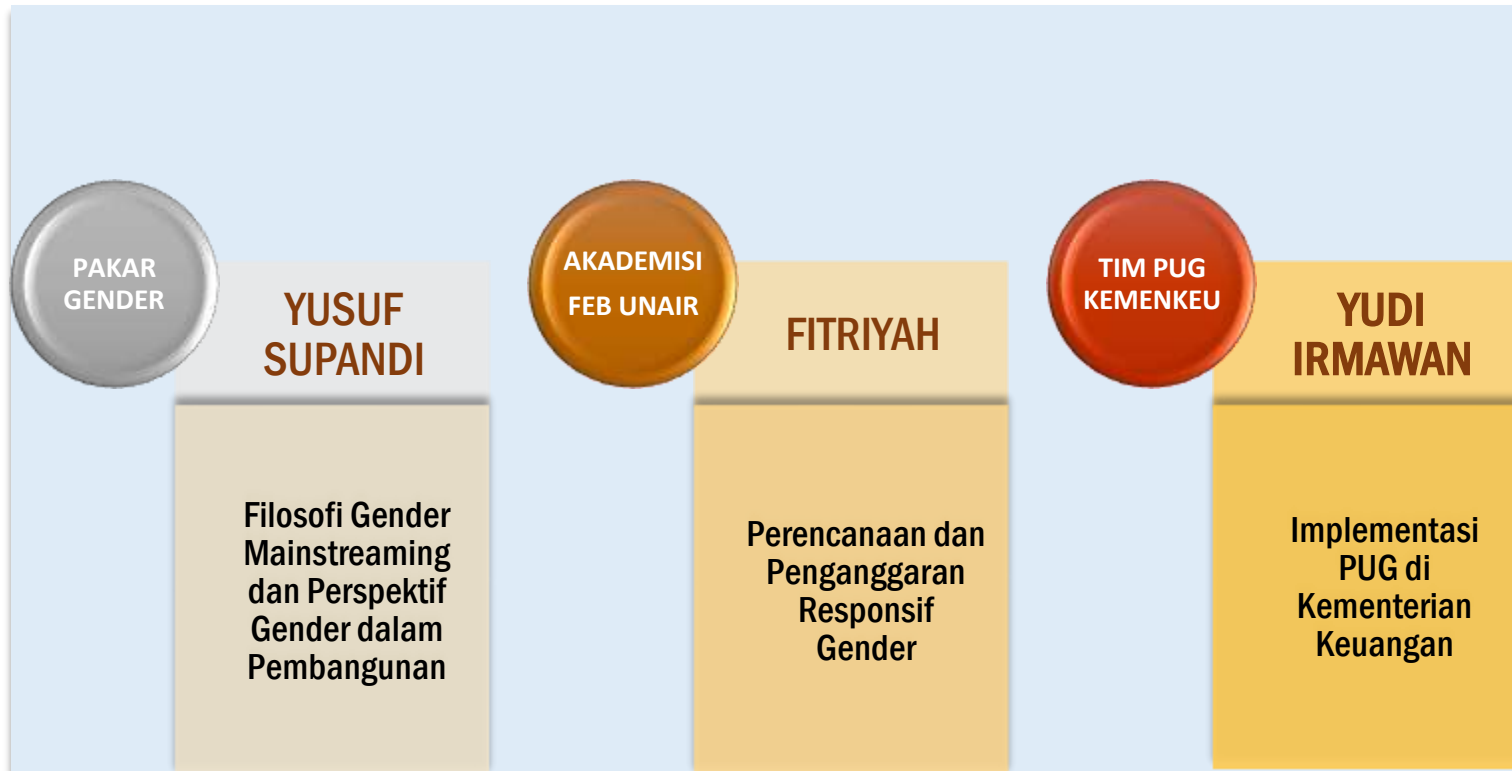
Sejak 2015, dilakukan penyempurnaan aplikasi e-Auction, terjadi peningkatan atas partisipasi peserta lelang, terutama **kaum perempuan**.



PARTISIPASI MASYARAKAT

FORUM GROUP DISCUSSION

“PENGANGGARAN BERBASIS GENDER PADA ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH”



Pelibatan Pakar Gender Dan Akademisi Universitas Airlangga Dalam Pembangunan Kebijakan Anggaran Responsif Gender Bagi Pemerintah Pusat Dan Daerah

JURI LOMBA IMPLEMENTASI PUG KEMENKEU





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PARTISIPASI MASYARAKAT



2018

HASIL KAJIAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO

DISUSUN OLEH

**TIM PENELITI
UKM CENTER FEB UI**

KAJIAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO

Intervensi terkait program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dilakukan melalui 2 cara, pemberian bantuan cuma-cuma dan pinjaman lunak bunga rendah

Alternatif softloan (agar bisa merubah perilaku tidak hanya konsumtif, tapi produktif) melalui Pusat Investasi Pemerintah, BLU di bawah Kemenkeu yaitu program Ultra Mikro atau UMi

Pendampingan adalah kata kunci. Penguatan usaha agar meningkatkan produktivitas dan daya saing

PELIBATAN AKADEMISI UNIVERSITAS INDONESIA

Diseminasi Uji Skema
Pembiayaan UMi

Laporan Uji Dampak
Keekonomian
Pembiayaan UMi

Laporan Analisis
Statistik Deskriptif
Piloting Program
Pembiayaan UMi



PARTISIPASI MASYARAKAT



Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang **RESPONSIF GENDER**



PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM YANG RESPONSIF GENDER

PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM YANG RESPONIF GENDER

Perlunya integrasi perspektif gender dalam penyusunan aksi mitigasi dan adaptasi dampak negatif perubahan iklim terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, difabel, dan lansia)

Perempuan tidak hanya rentan dampak, tapi juga merupakan agen perubahan dalam aksi pengendalian perubahan iklim

Selaku K/L Driver PPRG, Kemenkeu Bersama KPPPA mengintegrasikan isu gender ke dalam pembiayaan perubahan iklim

PELIBATAN PASRTISIPASI MASYARAKAT

United Nation
Development Programme
(UNDP)

Pusat Telaah dan
Informasi Regional
(PATTIRO)

Akademisi Gender
Prof. Ismi Dwi Astuti

Kementerian LHK
Kementerian PPPA



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PARTISIPASI MASYARAKAT

DISKUSI PUBLIK PENGANGGARAN PERUBAHAN IKLIM YANG RESPONSIF GENDER



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PERBERDAYAAN SOSIAL
DAFTAR POKOK HUKUM DAN
REPUBLIK INDONESIA



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
FINANCING
PHASE 2
Mainstreaming Gender Equality Through Fiscal Policies



UN
DP

Diskusi Publik:

beberapa saat lagi. Streaming akan dimulai

PENGANGGARAN PERUBAHAN IKLIM YANG RESPONSIF GENDER

KEYNOTE SPEECH



Febrio Nathan Kacaribu
Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan



Agustina Erni
Deputi Kesetaraan Gender
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

NARASUMBER



Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir
Penasehat Khusus Perubahan Iklim
Kemenko Kemaritiman dan Investasi



Adi Budiarmo
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan
Perubahan Iklim & Multilateral
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan



Emma Rachmawaty
Direktur Mitigasi Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Maya Rostanty
Direktur PATTIRO



Yenny Widjaja
Spesialis Gender
UNDP Indonesia



Henrietta Imelda
Hivos

MODERATOR



Zenitha Astra Paramitha
Badan Kebijakan Fiskal,
Kementerian Keuangan

Rabu, 20 Mei 2020
09.30 - 12.00 WIB

Livestream:
YouTube BKF Kemenkeu

PELIBATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

1

United Nation
Development Programme
(UNDP)

2

Pusat Telaah dan
Informasi Regional
(PATTIRO)

3

Kemenko Kemaritiman
dan Investasi

4

Kementerian PPPA



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PARTISIPASI MASYARAKAT

DAYCARE SEASONAL KEMENTERIAN KEUANGAN 2019



Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Bersama Anak-anak Pegawai Kemenkeu
Dalam Kegiatan Day Care Seasonal Sebelum Dan Sesudah Hari Raya Idul Fitri 2019



Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyelenggarakan kegiatan Daycare Seasonal Kementerian Keuangan Tahun 2019.

Kegiatan layanan ini sebagai bentuk Pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak-anak pegawai Kementerian Keuangan

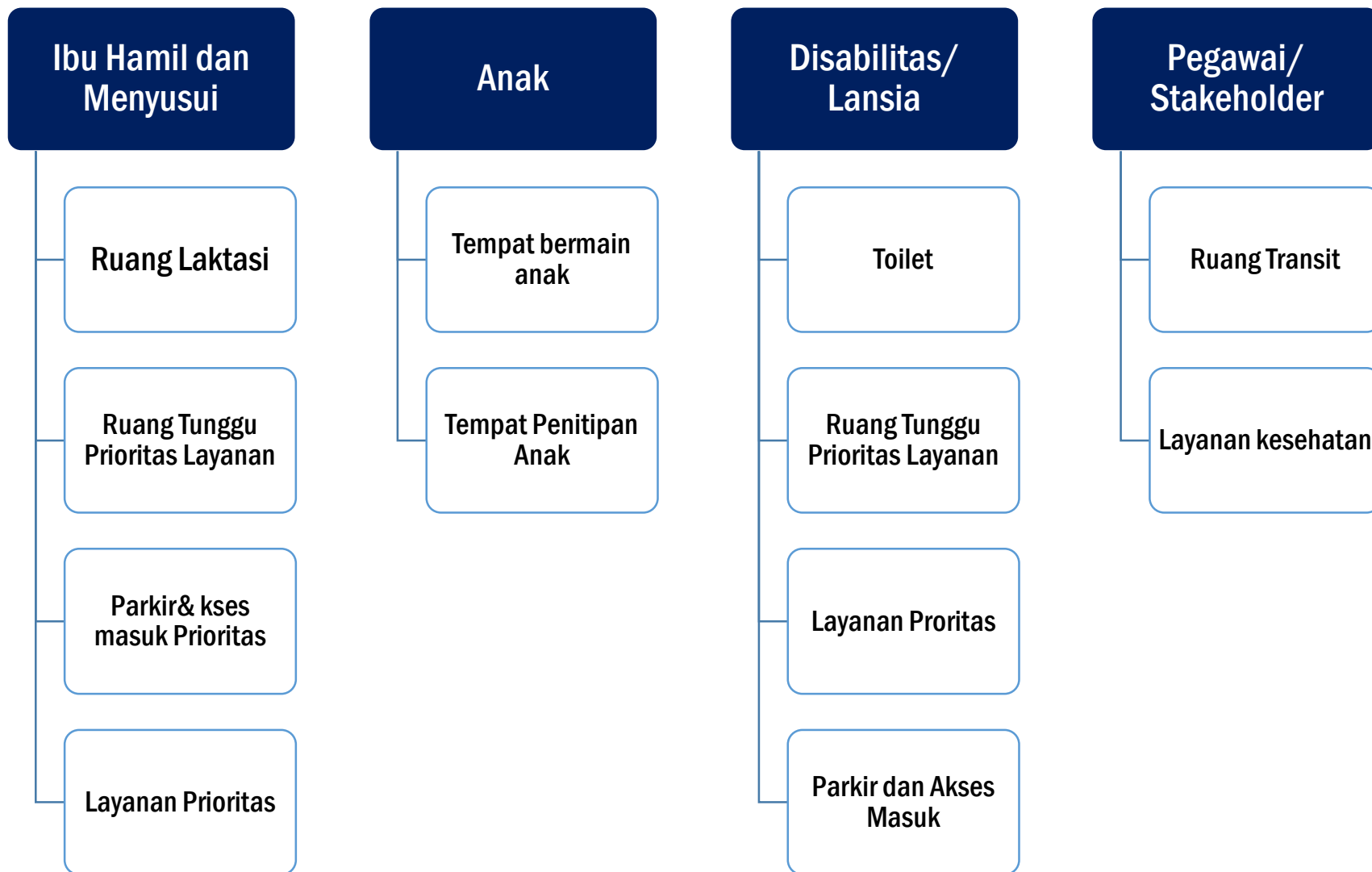


SARPRAS RESPONSIF GENDER KEMENKEU



PENYEDIAAN SARANA RESPONSIF GENDER

SE-3/MK.1/2018 TENTANG PENYEDIAAN SARANA KERJA YANG RESPONSIF GENDER DAN RAMAH ANAK





PENYEDIAAN SARANA RESPONSIF GENDER

RUANG LAKTASI



DJKN



DJPPR



ITJEN



BPPK



BDK PALEMBANG



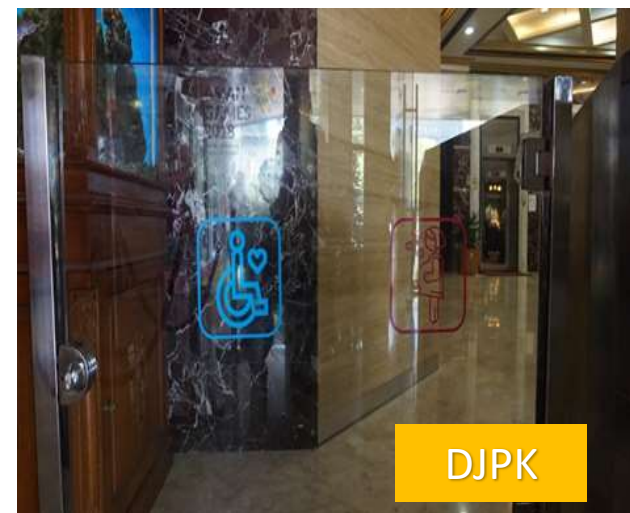
KANWIL DJPB GORONTALO



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENYEDIAAN SARANA RESPONSIF GENDER

PARKIR & AKSES MASUK PRIORITAS





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENYEDIAAN SARANA RESPONSIF GENDER

RUANG/LOKET PELAYANAN PRIORITAS

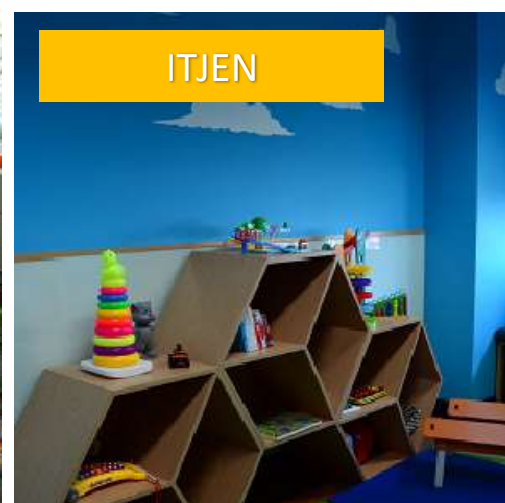
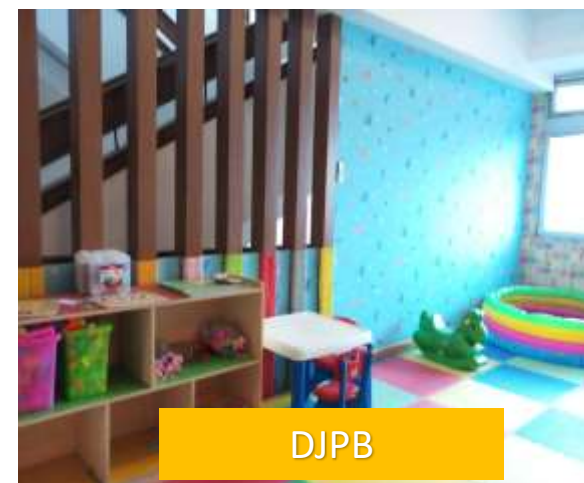
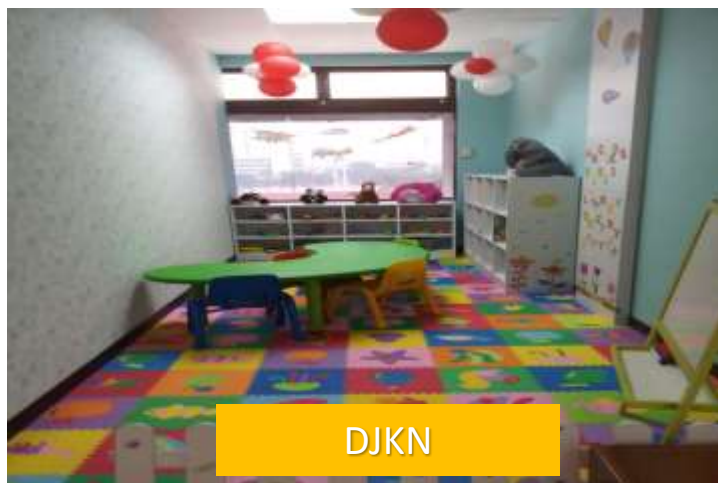




KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENYEDIAAN SARANA RESPONSIF GENDER

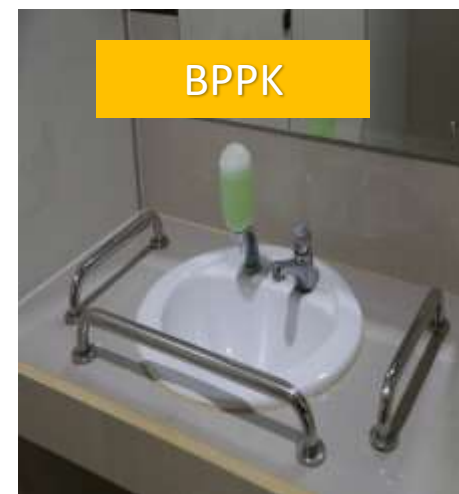
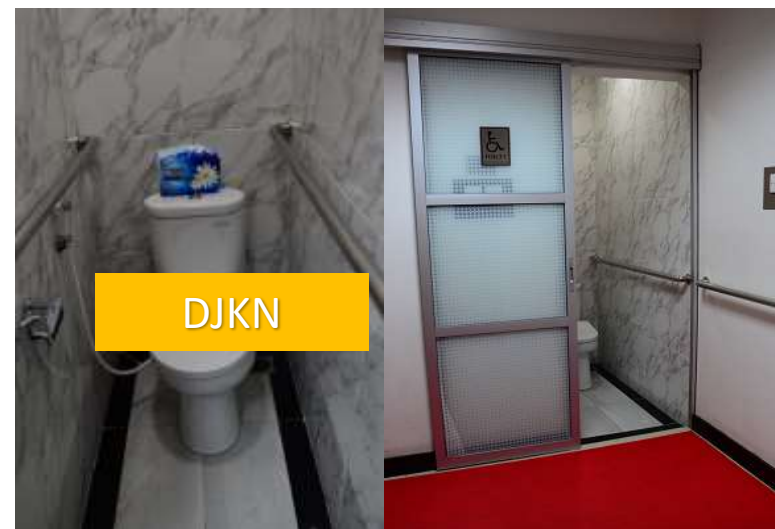
TEMPAT BERMAIN ANAK DAN TEMPAT PENITIPAN ANAK (DAYCARE)





PENYEDIAAN SARANA RESPONSIF GENDER

TOILET PRIORITAS





PENYEDIAAN SARANA RESPONSIF GENDER

LAYANAN PEGAWAI DAN STAKEHOLDER



BDK PONTIANAK



Kamarasrama dengan pendamping bagi penyandang disabilitas, ibu dan bayi atau berkebutuhan khusus lainnya disertai kulkas untuk ASI



Ruang Transit Pegawai pasca sakit



KPPBC
KUALANAMU

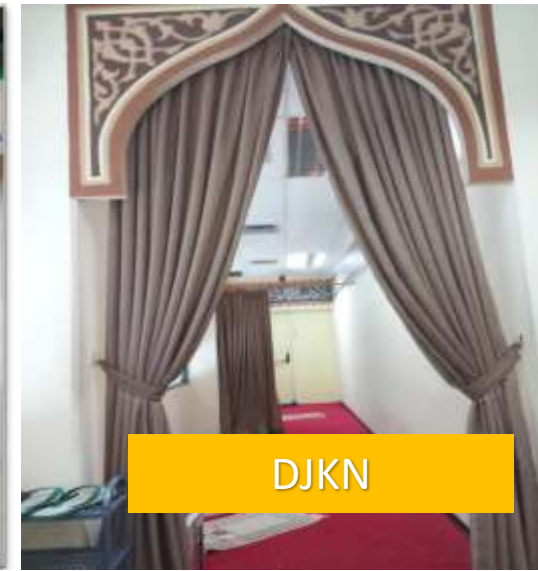


DJP

Ruang Istirahat Call Center



SETJEN



DJKN



PENYEDIAAN SARANA RESPONSIF GENDER

LAYANAN KESEHATAN



DJP



DJBC



SETJEN



SETJEN



BPPK



SETJEN





VIDEO IMPLEMENTASI PUG KEMENKEU

1. Video Implementasi PUG Kemenkeu 2020

2. IG : Implementasi PUG Kemenkeu 2021

3. IG : Dukungan Terhadap Anti Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja

4. Video E-learning PPRG (Cuplikan)

5. IG : Dialog Intergenerasional "Women and Girls: Game Changers in Development"

6. Video Daycare Seasonal 2019



TERIMA KASIH

TIM PENGGERAK IMPLEMENTASI PUG KEMENTERIAN KEUANGAN